

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Oleh:

INDAH MUTIARA SAFITRI

NIM 4317016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

INDAH MUTIARA SAFITRI

NIM 4317016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Mutiara Safitri

NIM : 4317016

Judul Skripsi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Indah Mutiara Safitri

NOTA PEMBIMBING

Ade Gunawan, M.M

Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kajen

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indah Mutiara Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi

Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Indah Mutiara Safitri

NIM : 4317016

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Studi Kasus LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Pembimbing,



Ade Gunawan, M.M

NIP. 198104252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : **INDAH MUTIARA SAFITRI**
NIM : **4317016**
Judul Skripsi : **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus
LKPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
2016-2020)**
Pembimbing : **Ade Gunawan, M.M**

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 8 November 2023 dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji

Penguji I

Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 19691227 199803 1 004

Penguji II

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si
NIP 19910109 202012 2 016

Pekalongan, 20 November 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan dan rezeki yang sangat tidak terbatas
2. Almarhum Bapak Amin Imron dan Ibu tercinta Darwati , terimakasih atas segala kasih sayang, cinta dan doa dari Bapak dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku, selalu memberi dukungan penuh dalam setiap perjalanan meraih cita-cita.
3. Kakakku satu satunya Agung Teguh Satria, serta teman temanku Risma, Vera, Dasy, Falah, Dian, Diyah, Ela, Nisa, Nila, Fifa dan Ninda.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang mendukung dalam selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, semoga kita sukses selalu.
7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini

ABSTRAK

INDAH MUTIARA SAFITRI. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020).

Pengungkapan laporan keuangan adalah data minimal yang harus diungkapkan oleh entitas keuangan termasuk entitas sektor publik. Namun berdasarkan penelitian awal ditemukan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah hanya melakukan pengungkapan sebesar 57,02 % dalam rentang waktu 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini yang untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit dan tingkat ketergantungan daerah terhadap Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini dalam memilih sampel menggunakan *proposive sampling* terdapat 35 LKPD terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel pada tahun 2016-2020. Sumber data yang dilakukan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laman resmi BPK dan Data non Keuangan Meliputi Total DPRD melalui perpustakaan BPS. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan aplikasi olah data SPSS 26.0.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (2) Tingkat Kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (3) Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (4) Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (5) Tingkat Ketergantungan Daerah t berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kata kunci: Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit Dan Tingkat Ketergantungan Daerah, Tingkat Pengungkapan LKPD

ABSTRACT

INDAH MUTIARA SAFITRI. Factors That Influence the Level of Disclosure of Regional Government Financial Reports (Case Study of Regency/City LKPD in Central Java Province 2016-2020).

Financial report disclosure is the minimum data that must be disclosed by financial entities including public sector entities. However, based on initial research, it was found that regional governments in Central Java only made 57.02% disclosures in the 2014-2018 period. The aim of this research is to determine the influence of government size, level of regional independence, legislative size, audit findings and level of regional dependence on the level of disclosure of regional government financial reports in districts/cities in Central Java Province

In this research, selecting samples used proportional sampling, there were 35 LKPD consisting of 29 districts and 6 cities. Sample in 2016-2020. The data sources used are secondary data obtained from the official BPK website and non-financial data including DPRD totals through the BPS library. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the SPSS 26.0 data processing application.

The research results show: (1) The size of the government has no effect on the level of LKPD disclosure (2) The level of regional independence has a negative effect on the level of LKPD disclosure (3) The size of the legislature has no effect on the level of LKPD disclosure (4) Audit findings have no effect on the level of LKPD disclosure (5) The level of regional dependency t has a negative effect on the level of LKPD disclosure

Keywords: Government Size, Level of Regional Independence, Legislative Size, Audit Findings and Level of Regional Dependence, Level of LKPD Disclosure

KATA PENGANTAR

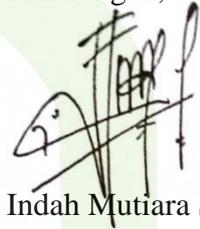
Alhamdulillah puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW., dengan harapan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.M.,M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., C.A. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Agus Arwani M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Ade Gunawan, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah bermanfaat memberikan ilmu bagi penulis.
9. Orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

10. Semua teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman dekat saya yang telah memberi semangat dan memberikan bantuan serta pengarahan pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap dan memohon kepada Allah SWT. agar memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan bagi orang lain.

Pekalongan, 17 Oktober 2023



Indah Mutiara Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Manfaat	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Stakeholder	11
2. Teori Stewardship.....	12
3. Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behaviour).....	14
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
5. Pengungkapan LKPD Dalam Calk	16
6. Ukuran Pemerintah Daerah.....	17
7. Tingkat Kemandirian Daerah	19

8. Jumlah Legislatif	21
9. Temuan Audit	23
10. Tingkat Ketergantungan Daerah.....	24
B. Telaah Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir.....	36
D. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan desain Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Setting Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Variabel Penelitian.....	44
F. Sumber Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DATA DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Keterbatasan Penelitian.....	81
C. Implikasi.....	82
D. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka.....	28
Tabel 3.1 Nama Kabupaten/ Kota Jawa Tengah	43
Tabel 4.1 Daftar Sampel Pemda Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah.	54
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas.....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastistas.....	59
Tabel 4.6 Hasil Autokorelasi Durbin Watson.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	65
Tabel 4.9 Uji t.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji F	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	36
-----------------------------------	----



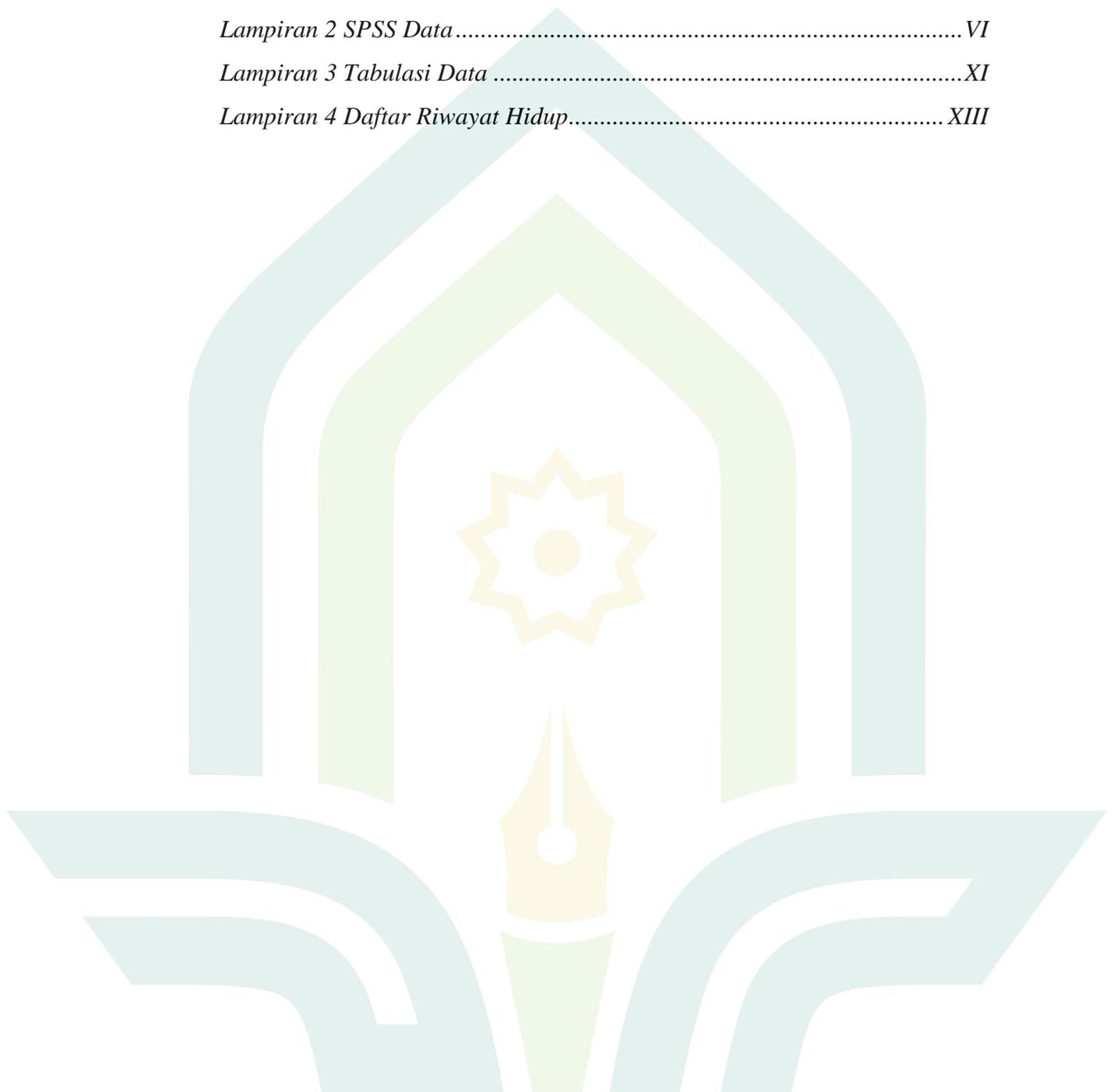
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengungkapan LKPD Jawa Tengah 2014-2018.....	3
Gambar 4.1 heteroskedastistas.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Surat Izin Penelitian</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2 SPSS Data</i>	<i>VI</i>
<i>Lampiran 3 Tabulasi Data</i>	<i>XI</i>
<i>Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....</i>	<i>XIII</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat pemda), otonomi daerah dan desentralisasi fiscal mulai diterapkan di Indonesia. Dimana sebagian urusan pemerintah pusat dialihkan ke pemda dengan tujuan untuk mengelola pemerintahan dengan baik dan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintahan yang bersih perlu adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya yang disusun berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP yang merupakan substitusi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

PP Nomor 71 Tahun 2010 berisi tentang SAP berprinsip akrual sedangkan PP Nomor 24 Tahun 2005 berisikan SAP berprinsip kas (Mardiasmo, 2009). Dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan presiden, gubernur, bupati, dan walikota harus mempertanggungjawabkan laporan hasil pelaksanaan APBN/APBD yang memuat Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

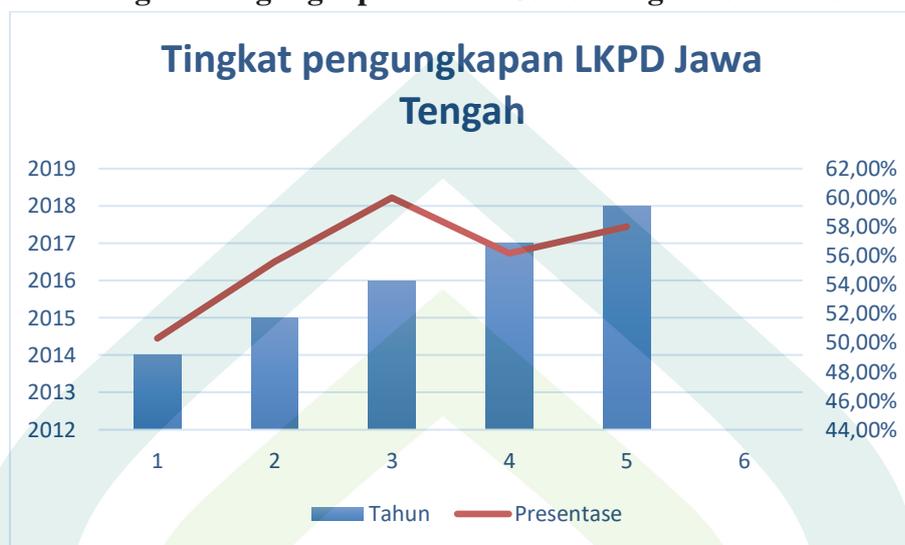
Laporan keuangan ialah suatu proses mengumpulkan, mengolah, serta memberitahukan informasi yang berguna dalam membuat keputusan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan menjadi suatu teknik

pertanggungjawaban serta pedoman mengambil keputusan sehingga dalam penyajian harus jelas dan terhindar dari kesalahpahaman. Setelah diperiksa BPK nantinya akan menghasilkan sebuah opini, salah satunya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maksudnya pengungkapan dalam pemerintah tersebut dinyatakan baik dan terpercaya. Menurut Efendy (2013) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti, 2018) memaparkan bahwa opini ini diperoleh dengan kriteria seperti, LKPD sesuai SAP, pengungkapan yang memadai, patuh terhadap UU, dan efektivitas SPIP. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, artinya terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan LKPD.

Penyajian dan pengungkapan LKPD sesuai SAP memuat tentang ketaatan terhadap anggaran dan urgensi pengungkapan informasi keuangan bagi pengguna. Tujuannya yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan terkait pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai bentuk pencapaian atas pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Mengutip berita dari “katadata.co.id” informasi mengenai BPK ditemukan adanya 14.964 kasus terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) tahun 2019 organisasi publik. Kasus tersebut diakibatkan karena kurangnya sistem pengendalian internal dan tidak patuhnya terhadap aturan UU dalam mengungkapkan informasi keuangan. Kerugian Negara ditaksir sebesar 10,35 triliun rupiah.

Gambar 1.1
Tingkat Pengungkapan LKPD Jawa Tengah 2014-2018



Sumber : Data BPK yang sudah diolah, 2019

Menurut www.jatengprov.go.id Pemprov Jawa Tengah mendapat nilai tertinggi penghargaan keterbukaan informasi publik pada 26 oktober 2021 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Jawa Tengah memperoleh penghargaan ini 4 kali sejak 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pemda terus berkembang.

Beberapa hasil riset menunjukkan rata-rata pengungkapan pada LKPD Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2014 hingga 2018 dibawah 60%. Rinciannya sebagai berikut 55,30% (2014), 55,59% (2015), 60% (2016), 56,18% (2017) dan 58% (2018). Penelitian sama dilakukan oleh Agustiningasih, Murni, & Putri (2017) sebesar 65%, Laupe, Saleh, Ridwan, & Mattulada (2018) sebesar 85%. Suparno & Nanda (2016) sejumlah 44,33% serta Simbolon & Kurniawan (2018) sebesar 38,32%.

Hasil riset terdahulu menyatakan bahwa tingkat pengungkapan yang

ada di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2014-2018 dikatakan rendah. Hal ini membuat ulasan yang menarik untuk diteliti terkait penyebab rendahnya tingkat pengungkapan terhadap LKPD Provinsi Jawa Tengah yang dihubungkan dengan variabel yang berbeda dan teori yang berkaitan. Berita dalam “katadata.co.id” menjadikan pertama kasus mengenai pengungkapan diketahui. Selanjutnya adanya riset terdahulu yang rata-rata hanya sebesar 57,02% selama 5 tahun (2014-2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Yang pertama yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Semakin besar ukuran Pemda maka semakin memudahkan pemda dalam menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahan karena dapat memberi kelancaran dalam memperoleh PAD (Azis, 2016 dalam Sari & Mustanda, 2019). Secara umum pemda yang memiliki ukuran besar akan memiliki total asset yang besar. Sehingga total asset yang besar mendorong pemda dalam mempublikasikan LKPD sebagai bukti bahwa pemda telah melakukan

Kemudian tingkat kemandirian daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini mempunyai arti bahwa bagaimana kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Suparno & Nanda (2016) semakin mandiri pemda dalam membiayai kegiatannya maka semakin luas tingkat pengungkapannya. Karena hal ini berhubungan dengan adanya akuntabilitas pemda terhadap

rakyat yang telah membayar sejumlah pajak maupun retribusi daerah.

Ukuran legislatif atau DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat dalam suatu daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Menurut Werry Darta (2002) dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarif Muhammad Damiri (2018) mengatakan bahwa DPRD mempunyai andil yang besar dalam mengawasi jalannya aktivitas pemda sehingga tercapai kinerja yang diinginkan. Pengawasan disini dapat diindikasikan bahwa DPRD juga ikut mengawasi atas laporan keuangan yang dibuat Pemda sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangannya.

Temuan Audit adalah kasus kasus yang ditemukan BPK dalam LKPD atas penyelewengan yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun aturan perundangan yang berlaku. Menurut Liestiani (2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi (2018) mengatakan bahwa dengan adanya temuan audit maka BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapannya. Sehingga semakin besar temuan BPK maka semakin besar pula jumlah pengungkapan yang akan diminta oleh BPK.

Faktor selanjutnya yaitu tingkat ketergantungan daerah. Tingkat ketergantungan adalah jenis pendanaan pemda yang berasal dari pemerintah pusat guna membiayai operasional pemda (Idris, Surasni dan Irwan, 2018). Pemda mengharuskan mengungkapkan yang lebih sebagai alat untuk memonitoring kinerja atas alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dana transfer yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin besar dana yang diberikan maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemda pada sumber dana lain dalam membiayai operasionalnya (Robbins & Austin, 1986) dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Haikal Firdaus (2023).

Terdapat penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa, tetapi berbeda dalam hasilnya, variabel *size* yang berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD yaitu penelitian dari Simbolon & Kurniawan, (2018). Namun, hasil yang berbeda dilakukan oleh Meri Andriani, dkk (2019). Rasio kemandirian, penelitian dilakukan oleh Simbolon & Kurniawan, (2018) menyatakan berpengaruh Sedangkan oleh Meri Andriani, dkk (2019) menyatakan tidak berpengaruh. Variabel ukuran legislatif penelitian dilakukan oleh Laupe et al., (2018) hasilnya positif dan Meli Marliani, dkk (2018) menyatakan tidak berpengaruh. Variabel temuan audit hasil yang menyatakan berpengaruh dilakukan oleh Rahayu & Mardiana (2016) namun hasil yang berbeda dilakukan oleh Meli Marliani, dkk (2018). Selanjutnya yaitu rasio ketergantungan, penelitian yang dilakukan oleh Suparno & Nanda (2016) hasilnya berpengaruh. Sedangkan oleh Meri Andriani, dkk (2019) hasilnya tidak berpengaruh.

Pemaparan riset terdahulu diatas mengemukakan adanya *research gap* karena diketahui nilai perolehan yang bermacam macam tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan. Variabel rasio ukuran pemda, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit dan tingkat

ketergantungan daerah menurut peneliti menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan. Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jaranganya penelitian tentang topik pengungkapan laporan keuangan dalam sektor pemerintahan karena terbatasnya informasi dan data pemerintah yang dapat diakses public ssecara bebas. Alasan memilih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel adalah karena adanya penelitian terkait tingkat pengungkapan LKPD yang hanya fokus pada skala yang lebih sempit, dan adanya penelitian Hilmi (2010) yang mengatakan bahwa pengungkapan paling tinggi dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan tersebut menjadi alasan bagi peneliti dalam mengangkat judul tentang **“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
2. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
3. Apakah ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
4. Apakah temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?

5. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD?
6. Apakah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit serta tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pengungkapan LKPD ?

C. Pembatasan Masalah

Objek penelitian ini menggunakan 35 LKPD kabupaten/kota di Jawa Tengah rentang waktu 2016 – 2020. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, jumlah legislatif, temuan audit Dan tingkat ketergantungan daerah dengan Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan LKPD. Teori yang digunakan yaitu teori Stakeholder, Teori Stewardship serta Theory Of Planned Behaviour.

D. Tujuan Manfaat

Melihat dari rumusan masalah yang disajikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
2. Mengetahui apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
3. Mengetahui apakah jumlah legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
4. Mengetahui apakah temuan audit daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

5. Mengetahui apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD
6. Mengetahui Apakah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, jumlah legislatif, temuan audit serta tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pengungkapan LKPD.

Manfaat secara teoritis dan praktisnya adalah:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa memperbanyak keilmuan akuntansi sektor publik tentang tingkat pengungkapan, memberikan penguatan terhadap dasar teori yang digunakan dan sebagai bahan rujukan peneliti lain yang relevan dengan tema yang diangkat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang keilmuan akuntansi dalam menjadi pendidik dan pejabat publik kelak

- b. Bagi pemerintah daerah

Peneliti berharap penelitian ini memberikan masukan pada pemda supaya patuh terhadap pengungkapan LKPD karena bentuk tanggung jawab pemda kepada masyarakat.

- c. Bagi pemerintah pusat/provinsi

Peneliti berharap penelitian ini menjadi pandangan terhadap

pemerintah pusat/provinsi tentang mengungkap LKPD pemda, gambaran kondisi keuangan pemda serta memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam mengambil keputusan tentang dana transfer dan lain sebagainya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan yang mendukung penelitian, penelitian serupa yang sejalan, kerangka berfikir serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari pembahasan yang meliputi penjelasan hasil analisis data dan metode analisisnya serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan serta saran penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder

Teori pertama dalam penelitian ini adalah teori *stakeholder*. Definisi *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* berpendapat suatu entitas berjalan tidak hanya untuk kebutuhannya sendiri tetapi juga wajib memberikan kemanfaatan terhadap stakeholdernya.

Teori Stakeholder menekankan pada akuntabilitas organisasi jauh dari kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Menurut Rokhlinasari (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Isnan Murdiansyah (2021) berpendapat bahwa sebuah organisasi, akan memilih secara sukarela dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, social dan intelektual guna memenuhi ekspektasi dari Stakeholder.

Hubungannya dengan penelitian ini yaitu Teori Stakeholder digunakan pemda dalam membantu menjalankan kegiatan pemerintahan. Entitas sebagai pemda sedangkan *stakeholder* meliputi pemerintah pusat, DPRD, BPK serta masyarakat. Pemda dituntut untuk mengungkap LKPD sesuai dengan SAP yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak pihak yang dirugikan karena terhindar

adanya asimetri informasi.

Salah satu kepentingan rakyat dan pemerintah pusat yaitu dengan adanya pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan memberikan akuntabilitas dan transparansi keuangan yang nantinya akan mempengaruhi dukungan rakyat dan pemerintah pusat terhadap pemda. Jika dipenuhi maka rakyat akan memberikan dukungan berupa keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah pada periode selanjutnya dan pastinya akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Kemudian untuk pemerintah pusat akan memberikan dukungan berupa pemberian dana transfer bagi Pemda. Mengingat PAD tidak cukup dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Pemda sangat mengutamakan kepentingan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar respon positif dari pemerintah pusat akan meningkatkan dana transfer yang diberikan.

2. Teori Stewardship

Teori *stewardship* merupakan teori yang berdasar pada perilaku dan pola manusia, dan pola psikologis pada entitas yang menerapkan model kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* diartikan adanya keterkaitan antara Pemda dengan masyarakat sebagai principal. Pemda selaku *steward* hanya mementingkan keperluan principal untuk memperoleh kesan baik dan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan operasional

pemerintahan.

Salah satu contoh praktik organisasi yang didasarkan pada teori Stewardship adalah praktik organisasi sektor publik. Pihak pemda yang bertindak sebagai steward akan melayani masyarakat sebagai pemilik. Pemda dan masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu terselenggaranya tatanan negara yang baik dan kesejahteraan masyarakat yang terjamin. Sehingga teori ini dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Pemda bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat demi kepentingan Bersama salah satunya yaitu penyajian informasi keuangan.

Pemda yang bertindak sebagai steward berkewajiban menyajikan informasi keuangan yang terdapat dalam LKPD. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan yang disusun berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga LKPD disusun harus berdasarkan SAP. pengelolaan sistem pengendalian intern yang baik diperuntukkan sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan LKPD yang transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian intern diciptakan oleh steward dengan maksud bahwa tujuan organisasi akan tercapai dan sebagai wujud pencegahan dari segala bentuk penyimpangan yang biasa menghambat dalam mencapai tujuan organisasi.

Implikasi teori steward dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan peran dari Pemda sebagai suatu institusi yang dipercaya

untuk bekerja sesuai keinginan masyarakat melalui pelaksanaan kewajiban dan fungsi yang sesuai, bertanggung jawab atas tugasnya, dengan begitu maka pelayanan publik dan kemakmuran masyarakat dapat maksimal. Dalam membantu menjalankan tugas dan fungsinya maka steward (manajemen dan auditor internal) memberi arahan mengenai efektifitas pengendalian intern untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

3. Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behaviour)

Theory Of Planned Behaviour yaitu teori psikologi yang dirumuskan oleh Ajzen (1999). Teori ini dikorelasikan antara keyakinan dengan perilaku maksudnya bagaimana minat terhadap perilaku dan perilaku dapat dibentuk. Menurut Ajzen (1991) dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhian Wahyuni (2017) mengatakan bahwa ada 3 indikator dalam membentuk perilaku antara lain sikap terhadap perilaku yaitu mengevaluasi tentang positif atau negatif seseorang mengenai perilaku tertentu, Norma subjektif yaitu pandangan seseorang yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain mengenai perilaku tertentu, dan persepsi kontrol perilaku yaitu mengenai kemudahan atau kesulitan seseorang dalam berperilaku tertentu.

Secara umum teori ini menerangkan bahwa semakin besar peran sikap dan norma subjektif berkorelasi dengan perilaku artinya semakin kuat keinginan seseorang dalam berperilaku. Dan semakin

besar peran persepsi kontrol perilaku maka semakin kuat pertimbangan seseorang dalam berperilaku. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk respon dari apa yang terlihat yang dihubungkan dengan target yang diberikan.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan menurut SAK adalah rangkaian dari proses pelaporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasannya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan laporan keuangan yaitu laporan yang disusun tentang posisi keuangan dan transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Menurut Suwanda (2013) dalam penelitian yang dilakukan Nurul Hikmah (2020) mengatakan bahwa LKPD berguna dalam memahami nilai sumber daya ekonomi seperti operasional perusahaan, kondisi finansial entitas, efektivitas dan efisiensi pelaporan, serta loyalitas terhadap UU.

Menurut Yosefrinaldi (2013) dalam penelitian yang dilakukan oleh Desy Dwi Rahmawati (2020) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas apabila informasinya mudah dipahami, membantu dalam mengambil keputusan, tidak menyimpang, kesalahan material serta dapat dipercaya. LKPD memuat ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD. Informasi dalam LKPD harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif agar nantinya informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas dan

efisiensi suatu entitas, menggambarkan kondisi keuangan entitas, serta menentukan ketaatannya terhadap aturan perundangan.

LKPD disusun paling lambat selama tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. Setelah diperiksa BPK, LKPD diserahkan ke DPRD kemudian ditetapkan Peraturan daerah mengenai akuntabilitas pelaksanaan APBD. DPRD sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, wajib menilai atas LKPD yang disampaikan oleh kepala daerah. Penilaian didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK RI mengenai ketaatan dalam perundangan dan standar akuntansi, penilaian terhadap tingkat ekonomi serta kinerja organisasi.

5. Pengungkapan LKPD Dalam Calk

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah, pengungkapan berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai “Standar Akuntansi Pemerintahan”. Suhardjanto dan Lesmana (2010) dalam penelitian yang dilakukan Dekeng Setyo (2019) berpendapat bahwa laporan keuangan yaitu sebuah pertanggungjawaban mengenai operasional perusahaan, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos pos dalam laporan keuangan. Informasi keuangan berguna sebagai suatu elektabilitas atas sumber daya yang dimiliki dan loyalitasnya terhadap UU.

Tujuan pengungkapan Secara umum yaitu sebagai pelaporan keuangan dan kepentingan pihak pihak dari informasi yang ada.

Informasi yang disajikan merupakan gambaran dari perusahaan yang sebenarnya yang disajikan secara lengkap, jelas, akurat dan dipercaya. Luasnya pengungkapan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap jumlah informasi yang diterima oleh pihak penerima informasi keuangan.

Secara teknis, pengungkapan adalah langkah terakhir dalam proses akuntansi ialah penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk dari pengungkapan dan pelaksanaan e-government di Indonesia (Prasasti, Rahayu dan Zultilisna, (2017).

Menurut Syafitri (2012) dalam penelitian yang dilakukan Dekeng Setyo (2019) berpendapat bahwa pelaporan berguna sebagai Akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Komponen pokok LKPD salah satunya yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 CaLK terdiri dari penjelasan naratif dari jumlah yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK memuat informasi kebijakan akuntansi dalam pelaporan sesuai dengan SAP untuk menghasilkan penyajian LKPD yang wajar.

6. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran daerah direfleksikan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh daerah artinya kabupaten / kota yang memiliki total aset

yang lebih besar maka akan lebih kompleks dalam daftar aset yang dimiliki, menjaga serta pengelolaannya. Sehingga pemerintah daerah akan lebih memperhatikan dalam hal pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Patrick, 2007; Cohen; dan Kaimenakis, 2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh Henny Agnecia Simbolon (2018).

Setiap kabupaten / kota memiliki jumlah aset yang berbeda sesuai dengan kemampuan daerah masing masing. Daerah yang memiliki pendapatan yang banyak biasanya memiliki total aset yang banyak pula. Namun tidak sedikit dari aset aset tersebut yang tidak di jaga dan di rawat dengan baik. Total aset dilihat dari total aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki oleh kabupaten / kota. Pemerintah yang memiliki ukuran besar tentunya juga mempunyai jumlah dan kekayaan yang besar pula.

Contoh praktik dalam upaya meningkatkan asset di Kabupaten Pekalongan menurut www.djkn.kemenkeu.go.id yaitu dengan adanya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan bentuk dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam sumber pendapatan negara dari pengelolaan asset. Pendekatan bisnis yaitu upaya dalam memaksimalkan potensi asset dalam menghasilkan pendapatan dalam bentuk skema bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengembangan dari Terminal Tipe A Pekalongan akan dikembangkan untuk UMKM Outlet, Food

Court, Sport Center, dan Amphi Theater. Hasil dari KSP diharapkan dapat memberikan keuntungan yang nantinya dapat memacu perekonomian daerah melalui peningkatan layanan transportasi darat dan memberikaan Penerimaan Negara Bukan pajak.

Firman Allah SWT dalam QS. An – Nisa : 58 yaitu

“Innallaha ya murukum an tu addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, innallaha ni'imma ya izukum bih, innallaha kana sami'am basira”

Artinya “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Maksud ayat tersebut yaitu akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang untuk melaporkan, dan memanifestasikan semua pertanggungjawaban yang sudah diamanahkan oleh pihak yang memberikan amanah tersebut.

7. Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan suatu daerah tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah agar tetap menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya campur tangan dari pusat. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang diporsikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri.

Meningkatnya PAD diharapkan agar Pemerintah Daerah mampu untuk membiayai kebutuhan kegiatan operasionalnya sehingga dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada Pemerintah Pusat. Dari

pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kemandirian daerah dihitung dari jumlah penerimaan yang berasal dari kekayaan daerah tersebut yang menjadi tolak ukur tingkat kemakmuran masyarakat.

Menurut Girsang & Yuyetta (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Shafira Rahmadia Utari (2019) menyampaikan bahwa rasio kemandirian ialah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk tetap bisa menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Besaran dana transfer mempengaruhi pengukuran kemandirian. Rasio ini juga menjadi salah satu alat dalam mengukur kinerja keuangan pemda.

Masyarakat sebagai pihak pemberi kemandirian kepada pemda akan meminta adanya keterbukaan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga dapat dikatakan jika semakin besar PAD yang diberikan masyarakat maka semakin tinggi pula rasio kemandiriannya serta semakin tinggi pula keinginan masyarakat adanya pengungkapan informasi keuangan. Tugas pemerintah yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan dana dari masyarakat tersebut dan berusaha menyampaikan alirannya.

Contoh praktiknya dalam penerimaan pajak reklame menurut Rizka Ariyanti (2020) yaitu, banyak sekali hambatan dalam pemasukan pajak terhadap PAD di BPKD Kabupaten Pekalongan seperti banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan pajak

reklamennya, banyak wajib pajak yang belum memahami dasar hukum dai pajak reklame dan masih minimnya pemahaman dalam perizinan pemasangan masa reklame. Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame sudah sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak reklame sudah melebihi target penerimaan pajak reklame. Namun untuk tingkat kontribusi pajak reklame belum berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten Pekalongan karena jumlah realisasi pajak reklame masih kurang dibandingkan dengan jumlah realisasi PAD. Firman Allah SWT dalam QS. Al – Qashash : 77 yaitu

“Wabtagi fima atakallahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabgil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin”

Artinya “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT tidak menyukai umatnya dalam memperoleh pendapatan dengan jalan yang batil seperti korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Sehingga kemandirian finansial itu sangat penting termasuk bagaimana cara memperolehnya.

8. Jumlah Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat di Indonesia sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD berfungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran dengan semestinya. DPRD memiliki peran dan potensi yang strategis dalam

hal pengawasan daerah agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan penyajian informasi keuangan Pemda agar bersifat transparan dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan proksi jumlah DPRD. Sumarjo (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Dini Kartika (2021) menyatakan bahwa DPRD sebagai pengawas diharapkan dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif efisien, transparan serta akuntabel. Bastian (2006) dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusti Indira (2017) berpendapat bahwa total DPRD diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja dan pengungkapan informasi akuntansi sesuai dengan SAP. Sehingga, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemda. Konsekuensinya adalah pemda akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku. Firman Allah SWT dalam QS Ali Imron : 104 yaitu

“Waltakum minkum ummatu yad’una ilal khairi wa ya muruna bil ma’rufi wa yan hauna anil munkar, wa ula ika humul muflihun”

Artinya “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” Maksud dari ayat tersebut yaitu pengawasan merupakan suatu akuntabilitas yang harus dilaksanakan dengan kebaikan disebuah badan resmi ataupun tidak resmi.

9. Temuan Audit

Menurut Mulyadi (2002) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wan Fahrudin (2017) berpendapat bahwa auditing ialah proses yang disusun dengan tujuan mendapatkan dan menguji bukti berkenaan dengan aktivitas ekonomi dalam menentukan tingkat kesesuaian antara kriteria yang ditentukan serta menginformasikan hasil temuan pada berbagai pihak. Menurut Kawedar (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Reny Aziatul (2019) menambahkan bahwa kualitas audit diperlukan dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan.

Temuan audit ialah perkara pelanggaran LKPD yang diketahui BPK berkenaan ketentuan SPI ataupun aturan perundangan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan, atau dalam bentuk rekomendasi. Menurut Setyaningrum (2012) dalam penelitian yang dilakukan Ayu Rahayu (2016) mengatakan bahwa temuan audit menunjukkan kualitas audit karena terdapat auditor yang bertugas dalam mendeteksi *Fraud*. Firman Allah SWT dalam QS. Ash Saff : 4 yaitu

“Innallaha yuhibbullazina yuqatiluna fi sabilih saffan ka annahum bun yanum marsus”

Artinya “Sesungguhnya Allah SWT suka dengan orang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” Maksud dari ayat tersebut yaitu

BPK dituntut untuk mengungkap informasi keuangan dengan sejujur jujurnya, dikarenakan hal tersebut menjadi dasar keputusan dalam suatu organisasi. Komitmen dan kejujuran dalam islam sangat diutamakan.

Menurut Liestiani (2012) dalam penelitian yang dilakukan Ayu Rahayu (2016) mengatakan bahwa, setiap laporan keuangan yang apabila diperiksa ditemukan adanya temuan audit maka BPK meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapannya. Pengungkapan yang dilakukan sebagai bentuk perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan dan menunjukkan pada masyarakat adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemda atas saran dari BPK. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah temuan audit maka semakin besar pula tambahan pengungkapan yang akan diminta BPK dalam laporan keuangannya.

10. Tingkat Ketergantungan Daerah

Menurut Mustikarini dan Fitriasaki (2012) dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan (2020) memaparkan bahwa tingkat ketergantungan diakui sebagai dana alokasi umum (DAU). Sedangkan berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2005, DAU merupakan pendapatan yang berasal dari APBN yang bertujuan sebagai pemerataan ekonomi dan membiayai pelaksanaan kebutuhan suatu daerah. DAU menentukan ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan komponen anggaran penerimaan DAU dan dana transfer lainnya dalam perhitungan tingkat

ketergantungan. Dana transfer merupakan pemberian dari pemerintah pusat/provinsi. Namun dana tersebut tidak diberikan begitu saja melainkan ada tanggung jawab pemda yang harus dilaksanakan oleh pemda yaitu dengan mengungkapkan informasi keuangannya. Pemda sebagai penerima dana bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintah pusat.

DAU adalah sebagai bukti adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemda untuk mengatur keperluannya sendiri. Tingkat ketergantungan menurut M. Ariansyah, Amir, & Achmad (2014) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulaiman (2020) menyampaikan bahwa total pendapatan dana alokasi dari pusat terhadap PAD. Tingkat ketergantungan menjadi tolak ukur atas kemandirian suatu daerah. Semakin rendah tingkat ketergantungannya maka semakin bagus dalam hal kemandiriannya yang dapat dilihat dari analisa tentang jumlah PAD dengan jumlah kebutuhan fiskal. Pemerintah tidak akan segan melaksanakan perintah dari pusat sebagai stakeholder pemda, apalagi berkaitan dengan hal hal yang berkelanjutan seperti contohnya dana transfer ini. Laporan yang baik dan sehat akan menentukan kepercayaan pemerintah pusat dan meningkatkan dana trabsfer yang diberikan. Firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 195 yang berbunyi

“Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin”

Artinya “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik”. Maksud dari ayat tersebut yaitu pemerintah daerah sebagai pengelola DAU wajib menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah SWT. dan tidak boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi yang jelas-jelas akan menjerumuskan diri dalam hal-hal yang tidak baik.

B. Telaah Pustaka

Sektor pemerintahan dituntut adanya transparansi dalam mengungkap informasi laporan keuangan sebagai akuntabilitas sumber daya entitas. Girsang (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulaiman (2020) menyampaikan bahwa daerah yang mempunyai jumlah kekayaan yang besar maka semakin besar pula dalam mengungkapkan LKPD. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulaiman (2020) menjelaskan yaitu DPRD berperan sebagai anggota legislatif dan fungsi pengawasan, Menurut Winarna dan Murni (2007) dalam Sumarjo (2017). Fungsi pengawasan DPRD yaitu bertanggung jawab atas ketentuan keuangan daerah agar cermat, cepat, tepat, terbuka, dan responsibilitas. Semakin banyak total DPRD maka semakin besar pula tingkat pengawasannya.

Menurut Sarah (2014) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulaiman (2020) temuan audit yaitu kasus ditemukannya pelanggaran dalam LKPD terhadap ketentuan pengendalian intern maupun kepatuhannya pada UU. Kriteria pemeriksaan atas kewajaran informasi

LKPD salah satunya bersumber dari informasi yang diungkap harus lengkap. Dengan demikian, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar pengungkapannya.

Menurut penelitian Feriyanti, Hermanto, & Suransi (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulaiman (2020), tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Maksudnya semakin besar ketergantungan pemda, Dengan demikian semakin luas pula tingkat pengungkapannya. Pemerintah pusat selaku pemberi DAU meminta adanya pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan terhadap dana yang diberikan.

Untuk mendukung argumen tentang landasan teori dan rancangan terkait penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menyajikan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan judul yang dan dibahas untuk menguatkan argumen peneliti serta menjadi landasan di dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Telaah Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
1.	Akhmad Priharjanto dan Yusniar Yuliana Wardani, 2016	Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	X1: <i>Size</i> X2: SKPD X3: Tingkat Ketergantungan X4: Kekayaan Daerah X5: Jumlah Penduduk X6: Temuan Audit X7: Opini Audit	Hanya variabel jumlah penduduk dan opini audit yang berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2009 - 2012
2.	Fuji Nurabila, 2018	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD Pemerintah Enrekang Sulawesi Selatan	X1: Kekayaan Daerah X2: Jumlah SKPD	Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Sedangkan Jumlah SKPD tidak berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Sulsel 2011 - 2017
3.	Ayu Rahayu dan Ana Mardiana, 2016	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderate terhadap LKPD Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan	X1: <i>Size</i> X2: Ukuran Legislatif X3: Temuan Audit X4: Rasio Kemandirian	Semua variabel berpengaruh positif signifikan kecuali rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2015

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
4.	Meri Andriani, Elfitri Santi dan Rasyidah Mustika,2019	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat	X1: Ukuran Pemerintah X2: Tingkat Ketergantunga X3: Umur Pemerintah X4: Ukuran Legislatif X5: Jumlah Penduduk	Variabel Ukuran Legislatif dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera
5.	Rizma Yunisa Widanti, 2019	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD Di Indonesia	X1: Jumlah DPRD X2: Jumlah OPD X3: Pendidikan Terakhir Kepala Daerah X4: Luas Wilayah	Variabel Jumlah DPRD, Jumlah OPD, dan Pendidikan Terakhir Kepala Daerah tidak berpengaruh, sedangkan variabel luas wilayah berpengaruh.	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2017
6.	Era Fatwa Amaliah, Haryanto, 2019	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah	X1: Tingkat Ketergantungan X2: PAD X3: Belanja Modal X4: Jumlah Penduduk X5: Temuan Audit	Variabel PAD dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel lainnya berpengaruh	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2017
7.	Lilis Setyowati, 2016	Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1: <i>Size</i> X2: Kekayaan Daerah X3: Umur Administrasi X4: Intergovernmental Revenue	Variabel kekayaan daerah dan pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan, <i>size</i> memiliki pengaruh negative signifikan dan variabel lainnya tidak	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda. 3. Sampel = LKPD

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
			X5: Diferensiasi Fungsional X6: Spesialisasi Pekerjaan X7: Pembangunan Manusia	berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib	seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2014
8.	Dadan Ramdani, 2016	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Banten	X1: Kekayaan Daerah X2: Tingkat Ketergantungan X3: Ukuran Daerah X4: Kompleksitas Daerah X5: Belanja Daerah X6: Jumlah SKPD	Variabel Kekayaan, Tingkat ketergantungan, dan Jumlah Pendidikan berpengaruh negatif. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Banten 2009 – 2011
9.	Putri Handayani Mustafa, 2019	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara	X1: Ukuran Legislatif X2: Kekayaan Daerah X3: Ukuran Daerah X4: Umur Administrasi X5: Rasio Kemandirian	Ukuran legislatif, kekayaan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Sementara ukuran daerah, umur administrasi dan rasio kemandirian tidak berpengaruh	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Kabupaten / Kota Sumatra Utara Tahun 2015 – 2017
10.	Romi Permadi, 2017	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD Pada Kabupaten / Kota Di Indonesia	X1: Total Aset X2: Kekayaan Daerah X3: Tingkat Ketergantungan X4: Umur Administratif X5: Jumlah SKPD X6: Ukuran Legislatif X6: Temuan Audit	Total Aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan, sedangkan Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Umur Administratif, Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif, dan Temuan Audit tidak berpengaruh	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2011 – 2014

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
11.	Henry Agnecia Uliarta Simbolon 2018	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia	X1: Ukuran Daerah X2: Ukuran Legislatif X3: Kekayaan Daerah X4: Intergovernmental Revenus X5: Umur Administrasi X6: Diferensiasi Fungsional X7: Spesialisasi Pekerjaan X8: Rasio Kemandirian	Hanya Variabel Ukuran Daerah yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi di Indonesia 2013 - 2014
12.	Dekeng Setyo Budiarto dan Luki Indarti, 2019	Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan LKPD Kabupaten di Jawa Tengah	X1: Ukuran Daerah X2: Umur Pemerintah X3: Jumlah Penduduk X4: Temuan Audit X5: Opini Audit	Variabel Umur Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2017
13.	Meli Marliani dan Moh. Amin, 2018	Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur	X1: Kekayaan Daerah X2: Tingkat Ketergantungan X3: Total Asset X4: Umur Pemerintah X5: Jumlah SKPD	Hanya Variabel Ukuran Legislatif Yang Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. Sedangkan Lainnya berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Jawa Timur 2016

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
14.	Fikrinah Naopal dkk, 2017	Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Barat	X1: Karakteristik Daerah X2: Jumlah Penduduk X3: Temuan Audt X4: Opini Audit	Semua variabel berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016
15.	Winda Meiliza Putri dkk, 2019	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD Kab / Kota Sumatera Barat	X1: Ukuran Pemerintah X2: Umur Pemerintah X3: Jumlah SKPD X4: Tingkat Ketergantungan X5: Rasio Kemandirian X6: Kekayaan Daerah X7: Opini Audit	Hanya variabel ukuran pemerintah dan tingkat ketergantungan yang berpengaruh terhadap tidak pengungkapan LKPD sedangkan lainnya tidak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD kab / kota Sumatera Barat 2015 - 2017
16.	Ferina Intan Lutfia dkk, 2018	Determinan tingkat pengungkapan LKPD	X1: Realisasi Pendapatan X2: Jumlah SKPD X3: Rasio Kemandirian X4: Ukuran Pemerintah X5: Umur Pemerintah X6: Jumlah Legisltif X7: Pendapatan Daerah	Variabel realisasi pendapatan, jumlah SKPD, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Jawa Tengah 2014 - 2016
17.	Putri Puspita Ayu, 2017	Anaisis faktor faktor pengungkapan LKPD	X1: Total Realisasi Belanja X2: Total Aset X3: Tingkat Ketergantungan	Variabel total realisasi belanja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier

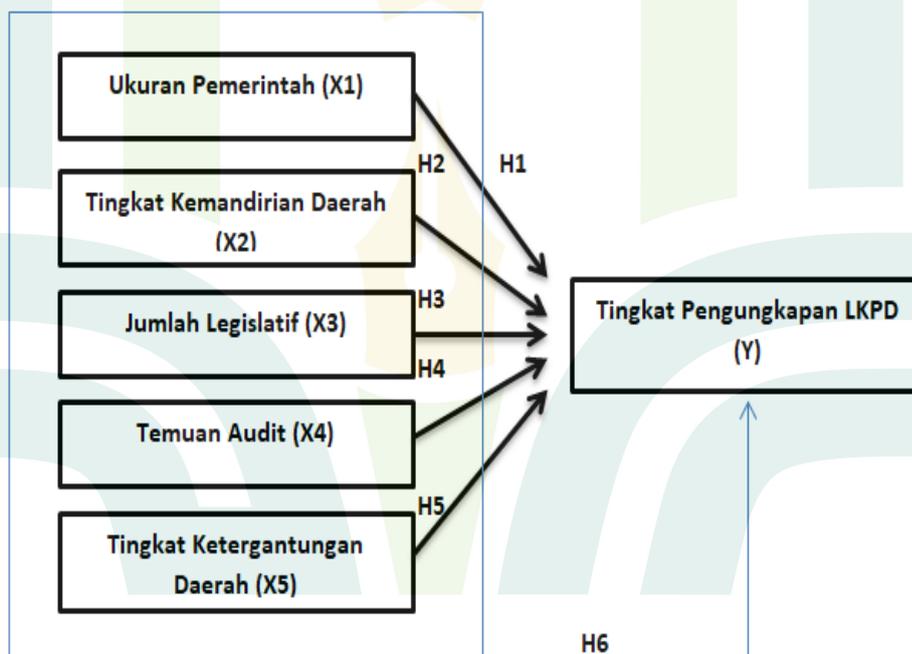
No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
			X4: Opini Audit	variabel lainnya berpengaruh.	Berganda 3. Sampel = LKPD Kab dan Kota Se Jawa barat 2014
18.	M, Zaenudin Asyrofi, 2016	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota Di Pulau Jawa Tahun 2014	X1: Kekayaan Daerah X2: Total Aset X3: Temuan Audit X4: Jumlah SKPD	Hanya variabel Kekayaan Daerah yang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Kab / Kota di pulau Jawa 2014
19.	Dina Rahmayanti, 2018	Determinan Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia	X1: Kekayaan Daerah X2: Ukuran Pemerintah X3: Jumlah SKPD X4: Umur Pemerintah X5: Temuan Audit	Hanya variabel Kekayaan Daerah yang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Di Indonesia 2014 – 2016
20.	Wahyu Sulaiman, 2020	Pengaruh Rasio Kemandirian, Tingkat Ketergantungan, Dan Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Dengan Jumlah SKPD Sebagai Variabel Moderasi	X1: Rasio Kemandirian X2: Tingkat Ketergantungan X3: Kekayaan Daerah X4: Jumlah SKPD	Hanya variabel kekayaan daerah yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Variabel lainnya berpengaruh sedangkan variabel jumlah SKPD hanya berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan.	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Moderasi 3. Sampel = LKPD Kab / Kota Jawa Tengah 2014 - 2018

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
21.	M. Ridwan dan M. Rizal Yahya, 2020	Pengaruh Tingkat Ketergantungan, Temuan Audit, Jumlah SKPD Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD	X1: Tingkat Ketergantungan X2: Temuan Audit X3: Jumlah SKPD X4: Ukuran Legislatif	Semua variabel berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD kab / kota Aceh 2015 – 2017
22.	M. Zahrul Fuadi dan Jhon Andra Asmara, 2020	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota Aceh	X1: Ukuran Pemerintah X2: Kemandirian Daerah X3: Tingkat Ketergantungan X4: Ukuran Legislatif X5: Temuan Audit	Variabel tingkat ketergantungan dan temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Moderasi 3. Sampel = LKPD Kab / Kota Aceh 2015 - 2017
23.	Ayunda Gita Pratiwi dkk, 2019	Pengaruh Karakteristik Daerah, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara	X1: Umur Pemerintah X2: Ukuran Pemerintah X3: Jumlah OPD X4: Ukuran Legislatif X5: Temuan Audit	Variabel jumlah OPD dan ukuran legislatif tidakberpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan variabel lainnya berpengaruh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD kab / kota Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2017
24.	Rafida dkk, 2019	Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah, Dan Umur Pemerintah Terhadap Tingkat	X1: Intergovernmental Revenue, X2: Kekayaan Pemerintah X3: Umur Pemerintah	Hanya variabel intergovernmental yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel ndependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Riset Yang Akan Dilakukan
		Pengungkapan LKPD Kab / Kota Sulawesi Tengah			3. Sampel = LKPD kab / kota Sulawesi Tengah 2014 – 2016
25.	Shafira Ramadhia Utami dan Sulardi, 2019	Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Opini Audit Dan Tingkat Kemandirian Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Di Indonesia	X1: Populasi X2: IPM X3: Opini Audit X4: Tingkat Kemandirian	Variabel populasi dan IPM berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.	1. Variabel independen 2. Metode analisis data = Regresi Linier Berganda 3. Sampel = LKPD Provinsi Di Indonesia 2017

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini Dependen yang digunakan yaitu tingkat pengungkapan dalam LKPD yang merupakan komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan menggunakan checklist pengungkapan laporan keuangan terhadap SAP terkait. Sedangkan untuk Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah ditunjukkan dengan Total Asset, Tingkat Kemandirian Daerah ditunjukkan dengan PAD, Ukuran Legislatif ditunjukkan dengan jumlah DPRD, Temun Audit ditunjukkan dengan jumlah temuan audit serta Tingkat Kemandirian Daerah ditunjukkan dengan DAU. Model kerangka pemikiran digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



D. Hipotesis

Ukuran Pemerintah berdampak pada tingkat pengungkapan serta penyajian laporan keuangannya, dikarenakan semakin besar ukuran pemda maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan, sehingga dalam menyajikan laporan keuangan harus akuntabel dan transparan karena memiliki total aset yang lebih besar (Lesmana, 2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Dekeng setyo (2019). Hal ini sependapat dengan penelitian Simbolon & Kurniawan, (2018) yang menghasilkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh pada pengungkapan LKPD.

Menurut Wahyu Sulaiman (2020) mengatakan bahwa teori steward menjelaskan ada 2 pihak yang berinteraksi yaitu steward dan principal. pemda selaku steward harus selalu patuh dalam mengungkapkan informasi mengenai kekayaan daerah kepada masyarakat sebagai principal. Hal ini agar mendapat respon positif dari masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Besaran kekayaan daerah akan meotivasi pemda dalam mengungkapkan setiap informasi laporan keuangan.

- a. H1 : Terdapat pengaruh positif ukuran pemerintah pada tingkat pengungkapan LKPD

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari masyarakat. Maka Semakin banyak PAD yang diterima, maka semakin banyak tingkat pengungkapan LKPDnya. Pernyataan tersebut sependapat dengan penelitian Simbolon & Kurniawan (2018) yang menyatakan

bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD.

Menurut Wahyu Sulaiman (2020) berpendapat bahwa Pernyataan tersebut didukung oleh teori Stewardship yang menyebutkan bahwa Pemda sebagai Steward akan memenuhi keinginan dari masyarakat selaku principal. Teori ini mendorong pemerintah untuk mendorong untuk mengungkapkan informasi keuangan yang diwajibkan. PAD yang diterima akan mempengaruhi kemandirian daerah dan mampu meningkatkan tingkat pengungkapan yang dilakukan.

- b. H2 : Terdapat pengaruh positif tingkat kemandirian daerah pada tingkat pengungkapan LKPD.

DPRD sebagai fungsi pengawasan, mempunyai tugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan, memantau penerapan dan pelaporan dalam LKPD. Sehingga semakin banyak anggota DPRD maka bertambah besar pula kewajiban pemerintah dalam mengungkapkan LKPD secara lengkap. Hal ini sependapat dengan penelitian Laupe et al., (2018) yang menyatakan bahwa jumlah legislatif berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD.

Menurut Wahyu Sulaiman (2020) dalam teori stewardship terbagi menjadi 2 yaitu pemerintah daerah sebagai steward dan DPRD sebagai principal. Dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai principal merupakan bagian dari pengawasan pemda sebagai steward dalam melaksanakan tugas pemerintahan agar tidak terdapat

kecurangan. Hal ini juga dapat berimbas pada peningkatan dalam pengungkapan informasi keuangan.

- c. H3 : Terdapat pengaruh positif jumlah legislatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Adanya temuan oleh BPK adalah sebagai bentuk evaluasi dan upaya untuk meningkatkan pengungkapan dalam LKPD, artinya bertambah besar temuan audit maka bertambah besar pula pengungkapannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Rahayu & Mardiana (2016) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh pada pengungkapan LKPD.

Menurut Wahyu Sulaiman (2020) mengatakan bahwa teori steward dalam temuan audit yang ditemukan BPK sangat membantu pemda dalam melakukan pengungkapan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai pihak yang mempunyai informasi lebih mengenai sumber daya yang dikelola, pemda dapat memanfaatkannya tanpa menginformasikan hal penting tersebut kepada masyarakat. Sehingga ini menjadi dasar BPK harus melakukan audit terhadap LKPD yang akan disampaikan kepada rakyat.

- d. H4 : Adanya pengaruh positif temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

DAU adalah sebagai bukti adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemda untuk mengatur kebutuhannya sendiri. Menurut M. Ariansyah, Amir, & Achmad (2014) Tingkat ketergantungan ialah total

penerimaan PAD dari pusat yang menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah, Semakin kecil tingkat ketergantungan artinya semakin kecil pula tingkat pengungkapan yang diminta. Pernyataan tersebut sependapat dengan Suparno & Nanda (2016) yang menghasilkan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD.

Menurut Wahyu Sulaiman (2020) mengatakan bahwa Pemerintah pusat memberi sejumlah dana tidak secara Cuma Cuma, melainkan ada timbal baliknya yaitu berupa pengungkapan informasi keuangan. Teori stakeholder memiliki bidang etika dan moral. Dalam bidang etika bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manager harus mengelola organisasi untuk kepentingan stakeholder. Jadi, dengan adanya rasio ketergantungan yang tinggi maka akan memotivasi pemda untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat berupa informasi keuangan

- e. H5 : Terdapat pengaruh positif tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pemerintah dituntut untuk mengungkap semua informasi dalam LKPD sesuai dengan aturan yang berlaku meliputi ukuran pemerintah, tingkat kemandirian serta tingkat ketergantungan daerah. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya pengawas yaitu DPRD yang bertugas mengendalikan kebijakan keuangan agar pada saat diaudit

tidak ada kecurangan pengungkapan LKPD. Sehingga hasil audit yang diterima baik karena telah dilakukan dengan semestinya.

H6 : terdapat pengaruh positif antara ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, jumlah legislatif, temuan audit dan tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan desain Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif, karena datanya diambil berbentuk angka dengan skala rasio yang dianalisis ke dalam statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Desain penelitian menggunakan uji hipotesis untuk menguji pengaruh antar variabel. Pengaruh yang dimaksud adalah rasio ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, jumlah legislatif, temuan audit dan tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian pada persoalan fakta dari populasi untuk menanggapi hipotesis. Penelitian jenis ini digunakan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta dan sifat populasi.

C. Setting Penelitian

Objek penelitian menggunakan Pemda Provinsi Jawa Tengah. Berikut nama kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Tabel 3.1
Nama Kabupaten/ Kota Jawa Tengah

No.	Pemerintah Daerah	No.	Pemerintah Daerah
1	Kab. Banjarnegara	19	Kab. Pemasang
2	Kab. Banyumas	20	Kab. Purbalingga
3	Kab. Batang	21	Kab. Purworejo
4	Kab. Blora	22	Kab. Rembang
5	Kab. Boyolali	23	Kab. Semarang
6	Kab. Brebes	24	Kab. Sragen
7	Kab. Cilacap	25	Kab. Sukoharjo
8	Kab. Demak	26	Kab. Tegal
9	Kab. Grobogan	27	Kab. Temanggung
10	Kab. Jepara	28	Kab. Wonogiri
11	Kab. Karanganyar	29	Kab. Wonosobo
12	Kab. Kebumen	30	Kota Magelang
13	Kab. Kendal	31	Kota Pekalongan
14	Kab. Klaten	32	Kota Salatiga
15	Kab. Kudus	33	Kota Semarang
16	Kab. Magelang	34	Kota Surakarta
17	Kab. Pati	35	Kota Tegal
18	Kab. Pekalongan		

Sumber : Data diolah, 2023

D. Populasi dan Sampel

Populasinya diambil dari kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah ada 35 daerah yang berjumlah 175 LKPD. Tahun pelaporannya yaitu LKPD yang telah diaudit dengan rentang waktu 2016 - 2020. Alasannya yaitu karena tingkat pengungkapan LKPD rentang 5 tahun tersebut dikatakan masih rendah menurut data informasi terbaru dan kondisi terkini. Serta sudah sesuai dengan SAP terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian berjumlah 150 LKPD Kabupaten / Kota provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2020. Pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasar pada ketentuan yang meneliti (Sekaran, 2010 dalam

Maulana, 2015). Semua data yang dibutuhkan diambil dari laman resmi BPK, dan data non keuangan meliputi total DPRD melalui Perpustakaan BPS. Alasan menggunakan metode sampel jenuh yaitu ketika memaparkan hasil yang diujikan dapat diwujudkan secara fakta. Kriteria pengambilan sampel antara lain:

Kriteria-kriteria Penelitian

No	Kriteria Penelitian	Jumlah
1.	LKPD yang telah diaudit periode 2016-2020	175
2.	LKPD yang tidak menerima opini wajar tanpa pennegecualian	10
3.	KPD yang tidak memiliki data sesuai variabel penelitian	15
Total sampel yang terpilih		150

E. Variabel Penelitian

1. Pengungkapan Wajib (Y)

Secara teknis, pengungkapan adalah langkah terakhir dalam proses akuntansi ialah penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk dari pengungkapan dan pelaksanaan e-government di Indonesia (Prasasti, Rahayu dan Zultilisna, (2017).

Variabel dependennya yaitu tingkat pengungkapan LKPD. Indikator pengukuran pengungkapan pada penelitian Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulaiman (2020) memaparkan bahwa ada 34 item yang terdapat 5 PSAP. Nilai pengungkapan dilihat item yang diungkap dengan total item pengungkapan yang diwujudkan dalam rumus:

$$\text{Tingkat Pengungkapan Wajib} : \frac{\text{Jumlah Item Yang Diungkapkan}}{\text{Total Item Yang Harus Diungkapkan}} \times 100\%$$

2. Ukuran Pemerintah (X1)

Ukuran daerah direfleksikan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh daerah artinya kabupaten / kota yang memiliki total aset yang lebih besar maka akan lebih kompleks dalam daftar aset yang dimiliki, menjaga serta pengelolaannya. Sehingga pemerintah daerah akan lebih memperhatikan dalam hal pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Patrick, 2007; Cohen; dan Kaimenakis, 2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh Henny Agnecia Simbolon (2018).

Variabel ukuran pemerintah, merupakan skala dimana entitas dibagi berdasarkan total aset dalam neraca sejumlah aset lancar dan tidak lancar. Jumlah kekayaan pemda memuat Kas Daerah, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana cadangan serta lain lain yang diwujudkan dengan rumus :

$$\text{Ukuran} = \text{Total Aset Dalam Neraca}$$

3. Tingkat Kemandirian Daerah (X2)

Kemandirian keuangan suatu daerah tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah agar tetap menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya campur tangan dari pusat. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang diporsikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Variabel rasio kemandirian ialah membandingkan PAD dengan total penerimaan daerah. Indikator pengukuran variabel ini yaitu jumlah PAD dibagi dengan jumlah penerimaan daerah. Berikut rumusnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} : \frac{\text{Total Penerimaan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

4. Ukuran Legislatif (X3)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat di Indonesia sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD berfungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran dengan semestinya. DPRD memiliki peran dan potensi yang strategis dalam hal pengawasan daerah agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan penyajian informasi keuangan Pemda agar bersifat transparan dan akuntabel.

Variabel ukuran legislatif berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, DPRD sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggaraan pemda. Winarni dan Murni (2007) dalam Wahyu Sulaiman (2020), DPRD bertugas mengendalikan prosedur keuangan daerah agar cermat, cepat, tepat, terbuka, serta responsibilitas. Artinya bertambah besar total DPRD bisa meningkatkan pengawasan. Variabel ini dinyatakan dalam rumus :

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah Anggota Legislatif}$$

5. Temuan Audit (X4)

Menurut Mulyadi (2002) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wan Fahrudin (2017) berpendapat bahwa auditing ialah proses yang disusun dengan tujuan mendapatkan dan menguji bukti berkenaan dengan aktivitas ekonomi dalam menentukan tingkat kesesuaian antara kriteria yang ditentukan serta menginformasikan hasil temuan pada berbagai pihak. Menurut Kawedar (2010) dalam Reny Aziatul (2019) menambahkan bahwa kualitas audit diperlukan dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan. Mustikarini dan Fitriasaki (2012) dan Handayani (2010) dalam Wahyu Sulaiman (2020) memakai proksi temuan atas ketidaktaatan pada UU yang menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Temuan Audit} = \text{Jumlah Temuan Audit}$$

6. Tingkat Ketergantungan Daerah (X4)

Menurut Mustikarini dan Fitriasaki (2012) dalam M. Ridwan (2020) memaparkan bahwa tingkat ketergantungan diakui sebagai dana alokasi umum (DAU). Sedangkan berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2005, DAU merupakan pendapatan yang berasal dari APBN yang bertujuan sebagai pemerataan ekonomi dan membiayai pelaksanaan kebutuhan suatu daerah. DAU menentukan ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat.

Variabel tingkat ketergantungan yaitu membandingkan jumlah dana transfer dengan jumlah penerimaan daerah. Hal tersebut menjadi Indikator dalam pengukuran tingkat ketergantungan. Indikator ini relevan dengan yang dilakukan Hilmi & Martani (2012) dalam Wahyu Sulaiman (2020) yang perhitungannya dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} : \frac{\text{Total Penerimaan Dana Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

F. Sumber Data

Penelitian ini memakai data sekunder yang berasal dari LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit. Selain itu data ikhtisar hasil audit melalui laman resmi BPK, dan data non keuangan meliputi total DPRD melalui Perpustakaan BPS.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi Dokumentasi, ialah suatu cara mengumpulkan data melalui LHP atas LKPD Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2020 dan data lain yang dibutuhkan terkait dengan variabel yang diteliti.
2. Studi Pustaka, ialah pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal, karya ilmiah, dokumen, buku, artikel, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

H. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berisi penjelasan mengenai karakteristik dan pengukuran setiap variabel (Kusumawardani, 2012). Menurut Ghozali (2011) dalam Ayu Rahayu (2016) data yang berasal dari nilai rata rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan range bertujuan mengetahui gambaran keseluruhan sampel dan terpenuhinya kriteria sebagai sampel.

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011) dalam Ayu Rahayu (2016) uji ini digunakan dalam membuktikan apakah regresi dan variabel pengganggu berdistribusi normal. Dikatakan distribusi data

normal apabila nilai K-S mempunyai nilai probabilitasnya $> \alpha = 5\%$ / mendekati normal maka disebut model regresi yang baik dengan melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) dalam Ayu Rahayu (2016) uji ini digunakan dalam membuktikan apakah model regresi terdapat keterkaitan antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu tidak terdapat kaitan antara variabel independen. Multikolinieritas berasal dari nilai toleransi dan lawannya (*Variance Inflation Factor* / VIF). Dikatakan multikolinieritas jika mempunyai kriteria :

- i. Jika nilai VIF > 10 / jika nilai *tolerance* $< 0,1$ artinya terdapat multikolinieritas.
- ii. Jika nilai VIF < 10 / jika nilai *tolerance* $> 0,1$ artinya tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk membuktikan apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual antar setiap variabel atau korelasi variabel independen dengan nilai absolut residual. Heterokedastisitas artinya penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan. Menurut Ghozali (2011) dalam Ayu Rahayu (2016), model regresi yang baik apabila nilainya $>$

signifikansi / $\alpha = 5\%$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser.

d. Uji Autokorelasi

Digunakan dalam membuktikan apakah dalam model regresi linear terdapat keterikatan antara pengganggu periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila ada keterikatan maka dikatakan autokorelasi. Model regresi yang tidak terdapat autokorelasi maka disebut model regresi yang baik dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Uji syarat analisis digunakan sebagai Analisis data kuantitatif. Persamaan yang didapat dari sebuah asumsi bisa dilakukan secara statistik apabila memenuhi asumsi klasik, antara lain tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dengan bantuan *Software* SPSS atau *eviews*.

3. Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik yang dipakai adalah regresi linier berganda dalam menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

4. Uji Hipotesis

Teknik analisis data berguna untuk membuktikan pengaruh beberapa variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Menurut Ghozali (2011) dalam Ayu Rahayu (2016) menyampaikan dalam memperoleh keabsahan uji regresi, maka perlu dilakukan cara meliputi :

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengetahui kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan 1. Menurut Ghozali (2011) apabila nilai R^2 rendah artinya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila mendekati 1 artinya variabel independen menjelaskan variabel dependen secara penuh.

Terdapat kelemahan dalam koefisien determinasi yaitu bias pada jumlah variabel independen yang terdapat dalam model regresi. Setiap bertambah 1 variabel independen, maka R^2 akan naik maka hasilnya akan berbeda nantinya. Model regresi yang baik apabila menggunakan nilai Adjusted R^2 .

b. Uji Simultan (Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh secara bersamaan pada variabel dependen. Nilai F table ditentukan dengan nilai signifikansi sejumlah 5% dengan

derajat kebebasan $df = (nk)$ dan $(k-1)$ dimana n yaitu jumlah sampel, kriterianya sebagai berikut :

- i. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ / probabilitas $<$ nilai signifikan ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka H_a diterima, artinya variable independen secara bersama sama berpengaruh signifikan pada variabel dependen.
- ii. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ / probabilitas $>$ nilai signifikan ($\text{Sig} \geq 0,05$), maka H_a ditolak, artinya variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan pada variable dependen.

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t menyatakan secara individual pengaruh 1 variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011). Pada uji statistik t, nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Hipotesis dinyatakan ditolak / diterima jika memenuhi syarat antara lain :

- i. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ / probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- ii. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ / probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_o diterima, sehingga variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini menggunakan Pemda Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2020. Populasi yang diambil ada 35 daerah yang terdiri dari 150 LKPD. Berikut nama kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Sampel Pemda Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah

No.	Pemerintah Daerah	No.	Pemerintah Daerah
1	Kab. Banjarnegara	19	Kab. Pemasang
2	Kab. Banyumas	20	Kab. Purbalingga
3	Kab. Batang	21	Kab. Purworejo
4	Kab. Blora	22	Kab. Rembang
5	Kab. Boyolali	23	Kab. Semarang
6	Kab. Brebes	24	Kab. Sragen
7	Kab. Cilacap	25	Kab. Sukoharjo
8	Kab. Demak	26	Kab. Tegal
9	Kab. Grobogan	27	Kab. Temanggung
10	Kab. Jepara	28	Kab. Wonogiri
11	Kab. Karanganyar	29	Kab. Wonosobo
12	Kab. Kebumen	30	Kota Magelang
13	Kab. Kendal	31	Kota Pekalongan
14	Kab. Klaten	32	Kota Salatiga
15	Kab. Kudus	33	Kota Semarang
16	Kab. Magelang	34	Kota Surakarta
17	Kab. Pati	35	Kota Tegal
18	Kab. Pekalongan		

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Data statistik deskriptif bertujuan untuk menampilkan informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari *range*, *minimum*, *maximum*, standar deviasi, rata-rata (Ghozali, 2016). Hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah (X1)	150	3097086 0367210 00,00	,16	30970860 36721000 ,00	41771 32986 71824, 2000	32891255369 6051,75000
Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	150	,367895 4	,0921745	,4600699	,17830 5561	,0638181255
Jumlah Legislatif (X3)	150	25	25	50	45,01	6,465
Temuan Audit (X4)	150	18	12	30	22,51	3,920
Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	150	,298084 5	,2689728	,5670572	,45274 8615	,0479073291
Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)	150	33,37	161,04	194,41	174,80 00	7,03522
Valid N (listwise)	150					

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Ukuran Pemerintah (X₁) memiliki nilai range sebesar 3.097.086.036.721., nilai minimum sebesar 0,16, nilai maximum sebesar 3.097.086.036.721, standar deviation sebesar 3.289.125.536.960.52, dan nilai mean sebesar 4.177.132.986.718.24.

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Tingkat Kemandirian Daerah (X₂) memiliki nilai range sebesar 0,37, nilai minimum sebesar

0,09, nilai maximum sebesar 0,46, standar deviation sebesar 0,06, dan nilai mean sebesar 0,18.

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Jumlah Legislatif (X_3) memiliki nilai range sebesar 25, nilai minimum sebesar 25, nilai maximum sebesar 50, standar deviation sebesar 6,47, dan nilai mean sebesar 45,01.

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Temuan Audit (X_4) memiliki nilai range sebesar 18, nilai minimum sebesar 12, nilai maximum sebesar 30, standar deviation sebesar 3,92, dan nilai mean sebesar 22,51.

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) memiliki nilai range sebesar 0,30, nilai minimum sebesar 0,27, nilai maximum sebesar 0,57, standar deviation sebesar 0,05, dan nilai mean sebesar 0,45.

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) memiliki nilai range sebesar 33,37, nilai minimum sebesar 161,04, nilai maximum sebesar 194,41, standar deviation sebesar 7,04, dan nilai mean sebesar 1.724,8.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat distribusi variabel dependen dan variabel independen apakah berdistribusi normal atau tidak. Dimana uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov, dengan melihat nilai signifikan $> 0,05$ maka akan berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,95170901
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,034
	Negative	-,052
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan dari hasil uji normalitas pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Asymp.sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,200. Dari hasil

diatas nilai signifikan $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan uji normalitas berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji situasi apakah dalam metode regresi terdapat kolerasi antara variabel bebas atau independen. Untuk melihat agar tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Varians Inflating factor) < 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 0,1. Hasil multikolonieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	Ukuran Pemerintah (X1)	,537 1,862
	Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	,383 2,608
	Jumlah Legislatif (X3)	,549 1,823
	Temuan Audit (X4)	,996 1,004
	Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	,495 2,019

Berdasarkan pada tabel 3 diketahui bahwa hasil uji multikolonieritas dapat dilihat nilai VIF dari semua independen lebih kecil dari 10.00 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sehingga dari uji multikolonieritas diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas didalam penelitian ini digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan suatu varian pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah adanya heteroskedastisitas maka dapat di uji menggunakan uji glejser. Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,821	3,315		,248	,805
Ukuran Pemerintah (X1)	3,162E-16	,000	,108	,610	,544
Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	-3,898	3,803	-,219	-1,025	,310
Jumlah Legislatif (X3)	,019	,029	,118	,669	,506
Temuan Audit (X4)	-,001	,038	-,003	-,021	,983
Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	-1,671	3,995	-,068	-,418	,677

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5, dimana nilai signifikan dari variabel independen:

- i. Ukuran Pemerintah (X_1) $0,544 > 0,05$.
- ii. Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) $0,310 > 0,05$
- iii. Jumlah Legislatif (X_3) $0,506 > 0,05$.
- iv. Temuan Audit (X_4) $0,983 > 0,05$
- v. Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) $0,677 > 0,05$.

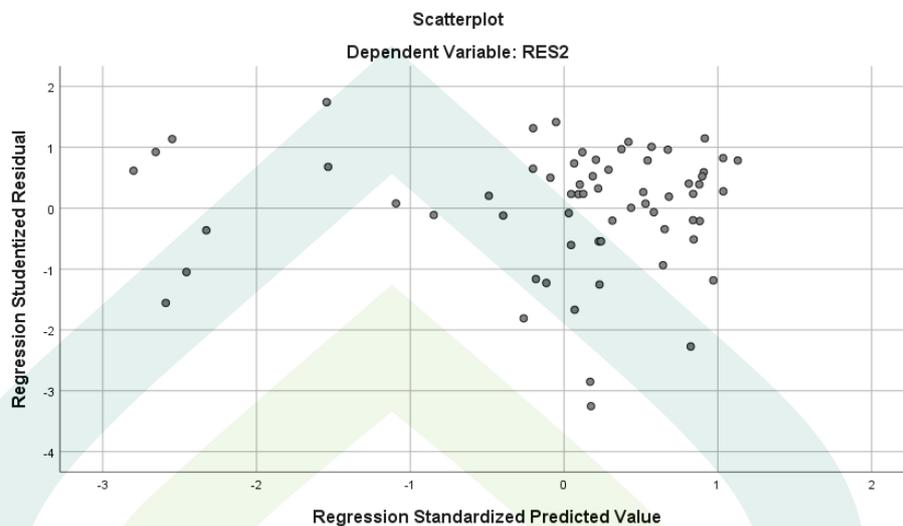
Nilai signifikan dari semua variabel independen dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) tidak terjadi heteroskedastistas.

Apabila ingin mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (grafik *Scatterplot*).

Jika:

- i. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- ii. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
heteroskedastistas



d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi korelasi (hubungan) diantara anggota-anggota sampel penelitian yang diurutkan berdasarkan waktu sebelumnya.

- i. Jika $d < 4 dL$, berarti ada autokorelasi positif
- ii. Jika $d > 4 dL$, berarti ada autokorelasi negatif
- iii. Jika $dU < d < 4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
- iv. Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan.

Tabel 4.6
Hasil Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.799	.790	3.206	2.129

$$n = 150$$

$$4-dL = 4-1.665 = 2,335$$

$$4-dU = 4-1.802 = 2,198$$

Hasil :

$$= du < d < 4 - du$$

$$= 1,802 < 2,129 < 2,198$$

Kesimpulan : berarti tidak ada autokorelasi dalam data ini

3. Analisis Regresi

a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan pro gram SPSS diperoleh persamaan yang dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	233,338	7,830		29,802	,000		
	Ukuran Pemerintah (X1)	1,804E-15	,000	,084	1,320	,189	,537	1,862
	Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	-21,742	8,333	-,197	-2,609	,010	,383	2,608
	Jumlah Legislatif (X3)	,023	,069	,021	,338	,736	,549	1,823
	Temuan Audit (X4)	,022	,084	,012	,262	,793	,996	1,004
	Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	-125,805	9,767	-,857	-12,880	,000	,495	2,019
	a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)							

Berdasarkan pada tabel 4.7 Maka persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = 233,338 + 15 X_1 + -21,742 X_2 + ,023 X_3 + 0,022 X_4 + -125,805 X_5$$

Keterangan:

- i. Konstanta sebesar 233,338, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah

(X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) anggaran 0 maka Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) sebesar 233,338.

- ii. Berdasarkan Ukuran Pemerintah (X_1) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah (X_1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 1,804E-15$ Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_1 , sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan sebesar nilai Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) $1,804E-15$.
- iii. Berdasarkan Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai yaitu $b = -21,742$ Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_2 , sebesar 1 poin maka akan terjadi penurunan sebesar nilai Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) $-21,742$
- iv. Berdasarkan Jumlah Legislatif (X_3) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Jumlah Legislatif (X_3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,023$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_3 , sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan sebesar nilai Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) $0,023$.
- v. Berdasarkan Temuan Audit (X_4) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit (X_4) memiliki

koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,022$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_4 , sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan sebesar nilai Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) 0,022.

- vi. Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai yaitu $b = -125,805$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_5 , sebesar 1 poin maka akan terjadi penurunan sebesar nilai Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) -125,805.

4. Uji hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	,684	,674	4,01973
a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Daerah (X5), Temuan Audit (X4), Jumlah Legislatif (X3), Ukuran Pemerintah (X1), Tingkat Kemandirian Daerah (X2)				
b. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 7. Menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh *adjusted R-Square* sebesar 0,674 yang berarti 67,4% variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang dipengaruhi oleh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5). Sedangkan sisanya (100-67,4) adalah sebesar 32,6% yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar persamaan tersebut.

b. Uji t

Uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan uji f (lihat perhitungan SPSS pada Coefficient Regression Full Mode/Enter). Uji sistematis t digunakan untuk mempengaruhi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikan t_{hitung} lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 di tolak. Dalam penelitian t_{tabel} diperoleh dari

$df = n-k-1$ ($150 - 5 - 1 = 144$) dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,976

Tabel 4.9
Uji t

Variabel	T	Signifikansi	Keterangan
Ukuran Pemerintah (X_1)	1,320	,189	Tidak Signifikan
Tingkat Kemandirian Daerah (X_2)	-2,609	,010	Signifikan
Jumlah Legislatif (X_3)	,338	,736	Tidak Signifikan
Temuan Audit (X_4)	,262	,793	Tidak Signifikan
Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5)	-12,880	,000	Signifikan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.9, dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Variabel Ukuran Pemerintah (X_1)

Dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel Ukuran Pemerintah (X_1) nilai t_{hitung} sebesar $1,320 < 1,976$ dengan nilai signifikan $0,189 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah (X_1) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y), maka H_0 diterima H_1 ditolak.

ii. Variabel Tingkat Kemandirian Daerah (X_2)

Dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) nilai t_{hitung} sebesar $-2,609 > 1,976$ dengan nilai signifikan $0,010 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y), maka H_0 ditolak H_1 diterima.

iii. Variabel Jumlah Legislatif (X_3)

Dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel Jumlah Legislatif (X_3) nilai t_{hitung} sebesar $0,338 < 1,976$ dengan nilai signifikan $0,736 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Legislatif (X_3) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y), maka H_0 diterima H_1 ditolak.

iv. Variabel Temuan Audit (X_4)

Dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel Temuan Audit (X_4) nilai t_{hitung} sebesar $0,262 < 1,976$ dengan nilai signifikan $0,793 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit (X_4) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y), maka H_0 diterima H_1 ditolak.

v. Variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5)

Dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) nilai t_{hitung} sebesar $-12,880 > 1,976$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y), maka H_0 ditolak H_1 diterima.

c. Uji F

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA.

Uji F berguna untuk menguji apakah ada pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) gabungan dari pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y).

Adapun dua cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probalitas hasil output Anova Jika nilai sig. $< 0,005$, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan $> 0,005$ maka hipotesis ditolak. Kedua adalah membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

maka hipotesis diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Dalam penelitian ini F_{tabel} diperoleh dari $F_{tabel} = k : n - k$ dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah responden. maka hasilnya ($150 - 5 = 145$) dengan tarif signifikan 0,05 sebesar 3,06. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibawah ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5047,866	5	1009,573	62,480	,000 ^b
	Residual	2326,785	144	16,158		
	Total	7374,651	149			
a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)						
b. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Daerah (X5), Temuan Audit (X4), Jumlah Legislatif (X3), Ukuran Pemerintah (X1), Tingkat Kemandirian Daerah (X2)						

- i. Berdasarkan tabel 4.10 output SPSS, diketahui nilai sig. adalah 0,000 Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit.
- ii. Berdasarkan tabel 4.10 output SPSS, diketahui nilai F adalah Karena nilai $F_{hitung} 62,480 > 3,06$ maka disimpulkan bahwa

hipotesis diterima atau dengan kata lain pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1) Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Ukuran Pemerintah (X_1) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Ukuran Pemerintah (X_1) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang menunjukkan nilai koefisien regresi adalah 1,804E-15, dan bertanda positif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,804E-15, jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Ukuran Pemerintah (X_1) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_1 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,189 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang

bernilai 1,320, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. zahrul Fuadi dan Jhon Andara (2020) yang menyatakan bahwa variabel ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Hal ini karena semakin banyak asset yang dimiliki Pemda tidak menjamin akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. dalam hal ini peran masyarakat dipertanyakan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang rendah membuat pemda tidak termotivasi dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan walaupun memiliki kekayaan yang tinggi. Pemda lebih mementingkan pengungkapan terhadap dana dari pemerintah pusat. Teori steward dalam penelitian ini tidak berjalan dengan baik. Peran pemda sebagai steward yang tidak memiliki kesadaran dalam mengungkapkan informasi keuangan sedangkan masyarakat sebagai Principal bersikap acuh. Dengan total asset yang besar, pemda cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang bagus. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2. Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat

Pengungkapan LKPD (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang menunjukkan nilai koefisien regresi adalah -21,742 dan bertanda negatif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 21,742 jika nilai variabel X_2 mengalami penurunan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tidak tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang tak searah antara variabel Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y).

Hal tersebut dikarenakan X_2 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,010 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai -2,609, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dadan Ramdhani (2016) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah yang diprosikan dengan PAD menunjukkan hasil negatif tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini terjadi karena semakin besar PAD yang dimiliki oleh Pemda maka akan sulit bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh besarnya PAD.

Menurut Suminto (2014) dalam penelitian yang dilakukan oleh Ricky Sheldy (2022) memaparkan bahwa pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara, terdapat 4 prinsip dasar

pengelolaan PAD yaitu akuntabilitas berdasar pada kinerja, adanya keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer yang profesional dan adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri juga menghindari adanya duplikasi dalam pemeriksaan. Caranya yaitu dengan adanya transparansi PAD dalam LKPD masing masing Kabupaten / kota. Sehingga sesuai dengan teori steward, tanggung jawab Pemda kepada masyarakat, pengawas, pemeriksa, atau pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut dapat terlaksana.

3. Pengaruh Jumlah Legislatif (X_3) Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Jumlah Legislatif (X_3) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Jumlah Legislatif (X_3) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang menunjukkan nilai koefisien regresi adalah 0,023 dan bertanda positif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,023, jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Jumlah Legislatif (X_3) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_3 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,736 yaitu

lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,338, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Fuadi dan Jhon Andara (2020) yang menyatakan bahwa variabel jumlah legislatif tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Hal ini karena jumlah legislatif yang banyak pada suatu Pemda belum tentu mampu memberikan kontribusi terhadap pemda itu sendiri. Teori steward dalam hal ini tidak berjalan dengan baik karena DPRD sebagai steward tidak bisa mengkoordinasi jalannya pemerintahan dengan baik dikarenakan semakin banyak anggota DPRD maka pemda akan semakin sulit dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sehingga hal ini berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat sebagai principal terhadap transparansi dan pelaporan informasi keuangan.

4. Pengaruh Temuan Audit (X_4) Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Temuan Audit (X_4) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Temuan Audit (X_4) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang menunjukkan nilai koefisien regresi adalah 0,022 dan bertanda positif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,022 jika nilai variabel X_4 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel

independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Temuan Audit (X_4) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_4 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,793 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,262, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen.

Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Dekeng Setyo Budiarto dan Luki Indarti (2019) yang menyatakan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Hal ini karena kecenderungan Pemda untuk menutupi pengungkapan informasi keuangan ketika memiliki masalah yang berkenaan dengan akuntabilitas misalnya dokumentasi anggaran dan akuisisi aset. Teori Steward tidak berjalan dengan baik karena pemda sebagai steward lebih memilih menutupi kesalahan kesalahan dari temuan audit sehingga pemda tidak berani mengungkapkan yang sebenarnya kepada masyarakat.

5. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap (Y). Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapat hasil bahwa Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit yang menunjukkan nilai koefisien regresi

adalah -125,805 dan bertanda negatif. Hal ini berarti variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 125,805 jika nilai variabel X_5 mengalami penurunan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tidak tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang tak searah antara variabel Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) dengan variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_5 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai -12,880, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dadan Ramdhani (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini terjadi karena dalam era desentralisasi hubungan pusat dengan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada monitoring khusus pelaporan keuangan Pemda oleh Pemerintah Pusat. Dengan kurangnya kontrol ini dalam hal menentukan dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong Pemda sebagai steward untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Seharusnya pemda lebih tegas dalam bertindak terkait adanya monitoring dana dari pusat baik itu melalui perencanaan anggaran belanja sampai dengan pelaporan keuangannya. Hal tersebut akan memunculkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemda sehingga transparansi dana dapat terealisasi dengan baik.

6. Pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y).

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditemukan bahwa Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Tingkat keeratan hubungan dari ketiga variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , terhadap Y mempunyai hubungan yang positif. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , mempunyai hubungan yang baik dengan Y . Dari hasil koefisien determinasi atau R square (r) yang menunjukkan bahwa 67,4% Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) yang dipengaruhi oleh variable Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5).

Sisanya yaitu sebesar 32,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Fenomena tersebut dipertegas pula dengan pengaruh yang kuat antara Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit. Teori steward berjalan dengan baik karena apabila dalam total aset, PAD dan DAU

dapat dimonitoring dengan baik oleh DPRD maka hal ini akan berdampak pada rendahnya temuan BPK sehingga opini yang dikeluarkan berupa Wajar Tanpa Pengecualian yang nantinya dapat meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dianggap sebagai sebuah bentuk kemandirian pemda dan kemandirian DPRD dalam laporan keuangan agar menghasilkan laporan yang akuntabel, andal, transparansi serta dapat dipertanggungjawaban oleh publik. Masyarakat sebagai principal tentunya akan merasa tenang karena pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Adapun kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah (X_1) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_1 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,189 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 1,320, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen
2. Tingkat Kemandirian Daerah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_2 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,010 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai -2,609, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.
3. Legislatif (X_3) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_3 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,736 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,338, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen.

4. Temuan Audit (X_4) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Y). Hal tersebut dikarenakan X_4 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,793 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t yang bernilai 0,262, menunjukkan tidak ada pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen..
5. Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap (Y). Hal tersebut dikarenakan X_5 memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang bernilai --12,880, menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.
6. Ukuran Pemerintah (X_1), Tingkat Kemandirian Daerah (X_2), Jumlah Legislatif (X_3), Temuan Audit (X_4), Tingkat Ketergantungan Daerah (X_5) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). diketahui nilai sig. adalah 0,000 Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai F adalah Karena nilai $F_{hitung} 62,480 > 3,06$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dipenelitian ini, diantaranya :

1. variabel yang dipakai dipenelitian terbatas di ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, ukuran legislatif, temuan audit dan tingkat ketergantungan. Sedangkan masih banyak variable lainnya yang diduga memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD.

2. Sampel dipenelitian ini masih terbatas di Pemerintah Daerah kabupaten / kota provinsi jawa tengah.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini bias memberi bukti empiris bahwasanya variabel ukuran pemerintah, jumlah legislative dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD yang terdapat di kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2020.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan Pemda untuk senantiasa meningkatkan pengungkapan informasi keuangan yang sudah ditentukan dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda itu sendiri. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengungkapan bukan lagi sekedar tanggung jawab melainkan sudah menjadi kewajiban bagi Pemda.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada karyawan yang bekerja di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit.
3. Bagi Masyarakat Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada di LKPD Kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 yang telah diaudit.
4. Bagi lembaga pendidikan memberikan motivasi lebih bagi para mahasiswa/i- nya untuk mengubah mindsetnya menjadi job creator, serta membantu meningkatkan skill para mahasiswanya dengan cara memberikan pelatihan- pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja maupun entrepreneur.
5. Menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan dan inovasi yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2016). Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kubu Bayu, D. J., & Triastuti, E. (2020). Using Giddens' structuration theory to examine the contesting participation of online mass media's journalists in Katadata. co. id framing. SEARCH (Malaysia), Gadang)
- Agustiningsih, S. W., Murni, s., & Putri, G. A. (2017) . Audit findings, local government characteristics, and local government financial statement disclosure. Review of Integrative Business and Economics Research.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014-2016. Akuntansi dan Manajemen.
- Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). Tingkat ketergantungan fiskal dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
- Bayu, D. J., & Triastuti, E. (2020). Using Giddens' structuration theory to examine the contesting participation of online mass media's journalists in Katadata. co. id framing. SEARCH (Malaysia).
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). InFestasi, 11(2).
- Firdaus, MH (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit. Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 12(01).
- Gilligan, T. W., & Matsusaka, J. G. (2001). Fiscal policy, legislature size, and political parties: Evidence from state and local governments in the first half of the 20th century. National Tax Journal.
- Girsang, H. A. V., & Yuyetta, E. N. A. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada LKPD kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). Diponegoro journal of accounting, 4(4).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate (Edisi ke-7). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hamdani, S., & MM, M. A. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.. Aplikasi Analisis Multivariate (Edisi ke-7). Semarang: Universitas Diponegoro
- Hamdani, S., & MM, M. A. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Handayani, S. (2010). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(2).
- Hartati, Y. (2011). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Study Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman). *Jurnal Universitas Andalas*.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Kawedar, W. (2010). Opini audit dan sistem pengendalian intern (Studi kasus di Kabupaten PWJ yang mengalami penurunan opini audit). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 6(8).
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting analysis journal*, 1(1).
- Keuangan, B. P. (2018). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*. BPK-RI, Jakarta
- Keuangan, B. P. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. BPK-RI, Jakarta.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2).
- Laupe, S., Saleh, F. M., & Mattulada, A. (2018). Factors influencing the financial disclosure of local governments in Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3).
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(10).
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Buku 1, Edisi Enam, Salemba Empat*. Jakarta.
- Murdiansyah, I (2021) Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas yariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA : Journal of Islamic Banking And Finance*, 5(1).
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., & Liestiani, A. (2010). Disclosure of local government financial statement in Indonesia. University of Indonesia. Depok.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012, September). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. In *Forum: Simposium Nasional Akuntansi (Vol. 15)*
- Medynatul, M. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Nurtari, A., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintahan Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2014).
- Nomor, P. P. (71). Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

- Rahayu, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Rahman, N. J. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Dan Intensitas Moral Terhadap Intensi Karyawan Melakukan Tindakan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing) (Studi Empiris Pada Karyawan BUMD Kabupaten Temanggung) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Rahmawati, D. D., & Anik, S (2020). Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Ekonomi.
- RI, Kementerian Agama. Al-Qur`an dan Terjemahnya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Rini, R., & Sarah, A. (2014). Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Etikonomi*, 13(1).
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(1).
- Sari, W. A., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia Tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2).
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2).
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1).
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia.

- Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebeias Maret Surakarta.
- Suparno, S., & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2).
- Suwanda, D. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. PPM Jakarta. Jakarta.
- Syoftia, E., Puspa, D. F., & Ethika, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 9(1).
- Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia).
- Yosefrinaldi, Y. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera. *Jurnal Akuntansi*
- Wahyuni, D., Basri, H., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Perceived Behaviour Control Dan Religiusitas Terhadap Niat Memiliki Rumah Berbasis Pembiayaan Syariah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 6(2).

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.iainpekalongan.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-139/In.30/F.IV/TL.00/01/2022 28 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 KM 14 Semarang 50265
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Indah Mutiara Safitri
NIM : 4317016
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di
Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
**"Faktor Faktor yang mempengaruhi pengungkapan LKPD kabupaten/kota provinsi Jawa
tengah tahun 2016-2020"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk
memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001

Dekan,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 Olah SPSS

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah (X1)	150	309708603 6721000,0 0	,16	309708603 6721000,0 0	417713298 671824,20 00	3289125 5369605 1,75000
Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	150	,3678954	,09217 45	,4600699	,17830556 1	,0638181 255
Jumlah Legislatif (X3)	150	25	25	50	45,01	6,465
Temuan Audit (X4)	150	18	12	30	22,51	3,920
Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	150	,2980845	,26897 28	,5670572	,45274861 5	,0479073 291
Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)	150	33,37	161,04	194,41	174,8000	7,03522
Valid N (listwise)	150					

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,95170901
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,034
	Negative	-,052
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Pemerintah (X1)	,537	1,862
	Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	,383	2,608
	Jumlah Legislatif (X3)	,549	1,823
	Temuan Audit (X4)	,996	1,004
	Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	,495	2,019

Uji Heteroskedastistas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,821	3,315		,248	,805
	Ukuran Pemerintah (X1)	3,162E-16	,000	,108	,610	,544
	Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	-3,898	3,803	-,219	-1,025	,310
	Jumlah Legislatif (X3)	,019	,029	,118	,669	,506
	Temuan Audit (X4)	-,001	,038	-,003	-,021	,983
	Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	-1,671	3,995	-,068	-,418	,677

a. Dependent Variable: RES2

Hasil Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,894 ^a	,799	,790	3.206	2.129

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	233,338	7,830		29,802	,000		
	Ukuran Pemerintah (X1)	1,804E-15	,000	,084	1,320	,189	,537	1,862
	Tingkat Kemandirian Daerah (X2)	-21,742	8,333	-,197	-2,609	,010	,383	2,608
	Jumlah Legislatif (X3)	,023	,069	,021	,338	,736	,549	1,823
	Temuan Audit (X4)	,022	,084	,012	,262	,793	,996	1,004
	Tingkat Ketergantungan Daerah (X5)	-125,805	9,767	-,857	-12,880	,000	,495	2,019

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	,684	,674	4,01973

a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Daerah (X5), Temuan Audit (X4), Jumlah Legislatif (X3), Ukuran Pemerintah (X1), Tingkat Kemandirian Daerah (X2)

b. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)

Uji t

Variabel	t	Signifikansi	Keterangan
Ukuran Pemerintah (X ₁)	1,320	,189	Tidak Signifikan
Tingkat Kemandirian Daerah (X ₂)	-2,609	,010	Signifikan
Jumlah Legislatif (X ₃)	,338	,736	Tidak Signifikan
Temuan Audit (X ₄)	,262	,793	Tidak Signifikan
Tingkat Ketergantungan Daerah (X ₅)	-12,880	,000	Signifikan

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5047,866	5	1009,573	62,480	,000 ^b
	Residual	2326,785	144	16,158		
	Total	7374,651	149			
a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)						
b. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Daerah (X ₅), Temuan Audit (X ₄), Jumlah Legislatif (X ₃), Ukuran Pemerintah (X ₁), Tingkat Kemandirian Daerah (X ₂)						

Lampiran 3 Tabulasi Data

NO	KAB/KOTA	TAHUN	X1	X2	X3	X4	X5	Y
1	Kab. Banjarnegara	2016	376499966728505.00	.1203957	45	24	.5319362	164
2	Kab. Banyumas	2016	512821398169580.00	.1897737	50	24	.4902051	174
3	Kab. Batang	2016	191931626574831.00	.1401012	45	19	.5277196	165
4	Kab. Blora	2016	232401073430697.00	.0921745	45	24	.5076588	168
5	Kab. Boyolali	2016	261163130390885.00	.1466319	45	24	.5180570	166
6	Kab. Cilacap	2016	401921095213573.00	.1532893	50	22	.4952398	163
7	Kab. Demak	2016	334565379239634.00	.1472284	50	29	.4653841	172
8	Kab. Grobogan	2016	257882797305733.00	.1358030	50	21	.5039484	169
9	Kab. Jepara	2016	518452302025345.00	.1531322	50	24	.4749913	173
10	Kab. Karanganyar	2016	278595965609368.00	.1497304	45	30	.4950289	167
11	Kab. Kendal	2016	324608496582069.00	.1403455	45	18	.5151364	167
12	Kab. Kudus	2016	349096765800216.00	.1484525	44	18	.4370834	169
13	Kab. Magelang	2016	283023126031756.00	.1416708	50	23	.5298712	166
14	Kab. Pati	2016	562006852075358.00	.1287987	50	18	.4938558	173
15	Kab. Pekalongan	2016	216687531764529.00	.1737613	45	21	.5184046	167
16	Kab. Pemasang	2016	297366240989619.00	.1303935	50	18	.5670572	164
17	Kab. Purbalingga	2016	226747774980036.00	.1442054	45	26	.5138698	167
18	Kab. Purworejo	2016	241563522339752.00	.1235375	45	19	.4547017	168
19	Kab. Semarang	2016	275975148719445.00	.1610282	45	20	.4897778	166
20	Kab. Sragen	2016	266694295307148.00	.1420022	45	20	.5102232	169
21	Kab. Sukoharjo	2016	411056809201923.00	.1879829	45	21	.4968745	171
22	Kab. Tegal	2016	279520457601258.00	.1462414	50	30	.5377212	165

23	Kab. Temanggung	2016	276537660759451.00	.1675881	45	16	.4813253	169
24	Kab. Wonogiri	2016	300672408743647.00	.1074195	45	17	.5628513	164
25	Kab. Wonosobo	2016	240333974355518.00	.1268688	45	28	.5340227	161
26	Kota Magelang	2016	292089358460744.00	.2622675	25	23	.5331986	162
27	Kota Pekalongan	2016	217704798342969.00	.2082504	30	17	.5329552	162
28	Kota Salatiga	2016	203667618572681.00	.2316121	25	19	.5183994	165
29	Kota Semarang	2016	28793140180037.00	.3635366	50	23	.2953116	184
30	Kota Surakarta	2016	673048955971761.00	.2498543	45	27	.4941481	172
31	Kab. Banjarnegara	2017	412677523584136.00	.1372054	45	30	.4425318	171
32	Kab. Banyumas	2017	546377738201712.00	.1923788	50	19	.4265327	178
33	Kab. Batang	2017	240341430781148.00	.1403483	45	30	.4974030	166
34	Kab. Blora	2017	254633522693821.00	.1390595	45	22	.4601950	172
35	Kab. Boyolali	2017	261399302549386.00	.1782750	45	23	.4661630	167
36	Kab. Cilacap	2017	387360295020530.00	.2112922	50	23	.4435112	166
37	Kab. Demak	2017	492703217022145.00	.1502343	50	24	.4331589	173
38	Kab. Grobogan	2017	282755850734834.00	.1815061	50	12	.4498298	176
39	Kab. Jepara	2017	588632148384104.00	.1503553	50	19	.4539336	170
40	Kab. Karanganyar	2017	291644844571143.00	.2031567	45	30	.4789252	169
41	Kab. Kendal	2017	301547398360453.00	.1977864	45	17	.4668304	169
42	Kab. Kudus	2017	406612639973540.00	.1845647	44	25	.4072740	172
43	Kab. Magelang	2017	301920842002809.00	.1776757	50	19	.4666979	175
44	Kab. Pati	2017	301920842002809.01	.1624348	50	19	.4283831	177
45	Kab. Pekalongan	2017	246966656841546.00	.1476827	45	22	.4402006	172
46	Kab. Pemasang	2017	322755132303414.00	.1809978	50	23	.5001521	169
47	Kab. Purbalingga	2017	240646828077461.00	.1817466	45	24	.4502435	171

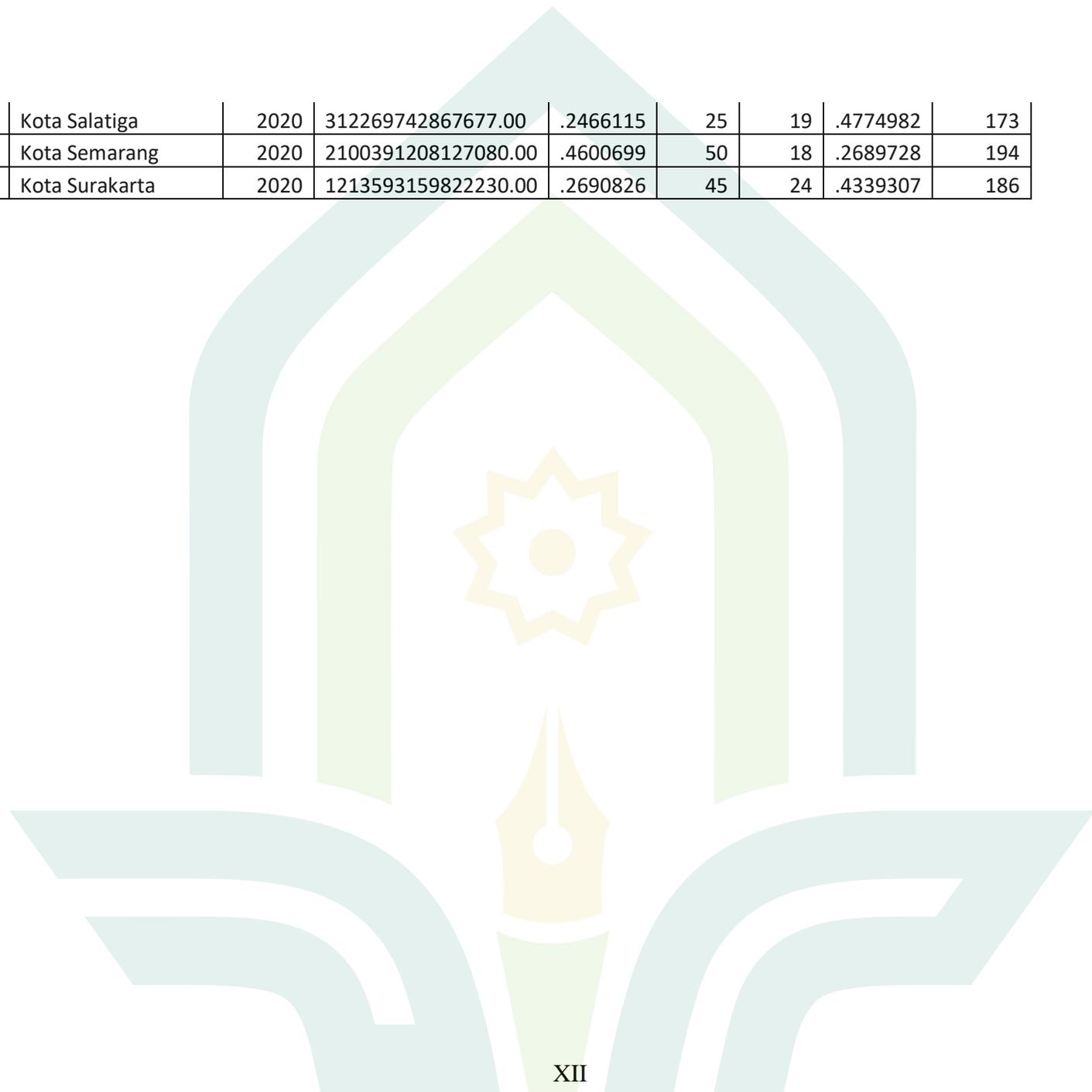
48	Kab. Purworejo	2017	258895612137538.00	.1411979	45	18	.4370382	172
49	Kab. Semarang	2017	311249950615950.00	.1954910	45	26	.4457737	173
50	Kab. Sragen	2017	290608354196067.00	.1849855	45	18	.4796531	170
51	Kab. Sukoharjo	2017	450321232784072.00	.2260041	45	20	.4409561	173
52	Kab. Tegal	2017	299106923798663.00	.1532301	50	24	.4658492	175
53	Kab. Temanggung	2017	294310383780672.00	.1733105	45	21	.4459932	178
54	Kab. Wonogiri	2017	319641279523376.00	.1440222	45	23	.4854715	166
55	Kab. Wonosobo	2017	267942092873064.00	.1246481	45	20	.4518836	167
56	Kota Magelang	2017	357920991012997.00	.2567906	25	24	.4838139	172
57	Kota Pekalongan	2017	231116631088434.00	.2096283	30	24	.4902781	166
58	Kota Salatiga	2017	303442487987915.00	.2494980	25	24	.5075839	161
59	Kota Semarang	2017	30040633244390.00	.4519745	50	30	.3002649	186
60	Kota Surakarta	2017	746951704460968.00	.2924431	45	18	.4583089	169
61	Kab. Banjarnegara	2018	435575122042570.00	.1137513	45	24	.4624804	168
62	Kab. Banyumas	2018	641986505245372.00	.1985124	50	16	.4206989	178
63	Kab. Batang	2018	220396262591114.00	.1395800	45	21	.4591303	168
64	Kab. Blora	2018	291685423329852.00	.0958106	45	22	.4369761	169
65	Kab. Boyolali	2018	311609096384490.00	.1539457	45	20	.4554317	177
66	Kab. Cilacap	2018	459047428543440.00	.1717313	50	20	.4434875	172
67	Kab. Demak	2018	508464749685159.00	.1597181	50	23	.4172884	181
68	Kab. Grobogan	2018	350478942674685.00	.1294294	50	22	.4486411	177
69	Kab. Jepara	2018	613225610526502.00	.1637217	50	22	.4366062	177
70	Kab. Karanganyar	2018	319093103815283.00	.1623311	45	13	.4629600	178
71	Kab. Kendal	2018	308126849784106.00	.1570644	45	25	.4471837	176
72	Kab. Kudus	2018	415921341394249.00	.1689755	44	24	.4042298	180

73	Kab. Magelang	2018	314176077781853.00	.1412086	50	17	.4606659	179
74	Kab. Pati	2018	619092314928396.00	.1376960	50	25	.4265949	179
75	Kab. Pekalongan	2018	276348198569028.00	.1481302	45	21	.4354871	176
76	Kab. Pemasang	2018	351251278558185.00	.1237435	50	24	.4862875	169
77	Kab. Purbalingga	2018	262191574319810.00	.1450795	45	26	.4524510	174
78	Kab. Purworejo	2018	277296029993145.00	.1400009	45	13	.4509020	173
79	Kab. Semarang	2018	438125446229056.00	.1811054	45	18	.4497755	179
80	Kab. Sragen	2018	337469729275805.00	.1535616	45	21	.4818641	171
81	Kab. Sukoharjo	2018	473816477681697.00	.2108887	45	24	.4409675	172
82	Kab. Tegal	2018	318419047958844.00	.1474757	50	22	.4533789	177
83	Kab. Temanggung	2018	310474841014286.00	.1455723	45	20	.4583348	172
84	Kab. Wonogiri	2018	344189716579176.00	.1170634	45	17	.4894025	172
85	Kab. Wonosobo	2018	307005734257034.00	.1225097	45	23	.4471067	172
86	Kota Magelang	2018	386540109656441.00	.2751683	25	24	.4845792	171
87	Kota Pekalongan	2018	246304941879298.00	.1979874	30	23	.4960673	166
88	Kota Salatiga	2018	311270978720555.00	.2347504	25	24	.5034512	165
89	Kota Semarang	2018	3097086036721000.00	.4301145	50	24	.2811317	188
90	Kota Surakarta	2018	773356902142404.00	.2808535	45	21	.4398952	176
91	Kab. Banjarnegara	2019	446937084787306.00	.1223655	50	24	.4743628	176
92	Kab. Banyumas	2019	622665241551268.00	.1999477	50	16	.4183602	181
93	Kab. Batang	2019	232171340810826.00	.1388937	45	30	.4617994	174
94	Kab. Blora	2019	336256289687361.00	.1101590	45	30	.4313131	171
95	Kab. Boyolali	2019	377014407720244.00	.1677345	45	25	.4435527	177
96	Kab. Cilacap	2019	573505578965053.00	.1749352	50	18	.4335327	177
97	Kab. Demak	2019	545047320119025.00	.1724800	50	23	.4007031	183

98	Kab. Grobogan	2019	364281644459456.00	.1334756	50	18	.4433812	176
99	Kab. Jepara	2019	649667993737667.00	.1594894	50	20	.4307955	178
100	Kab. Karanganyar	2019	347694297037469.00	.1779211	45	22	.4673489	175
101	Kab. Kendal	2019	302690885535708.00	.1572892	45	30	.4479641	177
102	Kab. Kudus	2019	446853128004462.00	.1644753	45	20	.4071107	182
103	Kab. Magelang	2019	327062944057202.00	.1619832	50	25	.4260892	182
104	Kab. Pati	2019	643975461597958.00	.1282185	50	25	.4369420	181
105	Kab. Pekalongan	2019	302068090681808.00	.1563812	45	25	.4463358	176
106	Kab. Pemasang	2019	378692705641092.00	.1329872	50	30	.4639769	176
107	Kab. Purbalingga	2019	284632868709287.00	.1473506	45	19	.4421665	178
108	Kab. Purworejo	2019	298723152004819.00	.1290699	45	18	.4434247	178
109	Kab. Semarang	2019	468978742716648.00	.1856267	45	28	.4333625	179
110	Kab. Sragen	2019	394184838483237.00	.1600842	45	24	.4708347	174
111	Kab. Sukoharjo	2019	519465543589462.00	.2139968	45	18	.4413444	175
112	Kab. Tegal	2019	337756747508503.00	.1582200	50	22	.4349426	179
113	Kab. Temanggung	2019	324009667894635.00	.1481666	45	22	.4413094	178
114	Kab. Wonogiri	2019	374037625403079.00	.1175847	50	25	.4835009	179
115	Kab. Wonosobo	2019	339053135657804.00	.1217055	45	28	.4480121	173
116	Kota Magelang	2019	401281668665114.00	.2826895	25	20	.4703283	174
117	Kota Pekalongan	2019	285667422267530.00	.2189914	35	27	.4897387	170
118	Kota Salatiga	2019	307215568461659.00	.2543985	25	20	.5064195	168
119	Kota Semarang	2019	1815941356647600.00	.4526132	50	25	.2885188	189
120	Kota Surakarta	2019	1171910571369520.00	.2805926	45	25	.4517702	179
121	Kab. Banjarnegara	2020	452891972497562.00	.1196423	50	24	.4515005	185
122	Kab. Banyumas	2020	654051583903271.00	.2006528	50	19	.3924470	187

123	Kab. Batang	2020	290976248994475.00	.1485342	45	24	.4287654	178
124	Kab. Blora	2020	338290182415256.00	.1408342	45	30	.4094530	179
125	Kab. Boyolali	2020	422769098973495.00	.1895328	45	22	.4014554	185
126	Kab. Cilacap	2020	604726712067974.00	.1875851	50	24	.4066550	182
127	Kab. Demak	2020	569712071805740.00	.1884077	50	19	.3688816	192
128	Kab. Grobogan	2020	377102250228897.00	.1385803	50	23	.4107597	188
129	Kab. Jepara	2020	662687804852450.00	.1811301	50	25	.4035563	186
130	Kab. Karanganyar	2020	442230340484181.00	.1813357	45	24	.4325117	183
131	Kab. Kendal	2020	313079961964484.00	.1673760	45	24	.4268368	182
132	Kab. Kudus	2020	467049630141484.00	.1904064	45	18	.3755114	187
133	Kab. Magelang	2020	342957783788845.00	.1385318	50	26	.4149101	185
134	Kab. Pati	2020	625489763566618.00	.1396152	50	18	.4189268	182
135	Kab. Pekalongan	2020	306606490178283.00	.1658268	45	21	.4293074	185
136	Kab. Pemasang	2020	380300155134007.00	.1340851	50	24	.4568343	180
137	Kab. Purbalingga	2020	276999411189032.00	.1606037	45	23	.4307015	182
138	Kab. Purworejo	2020	310845793073289.00	.1406588	45	27	.4292699	185
139	Kab. Semarang	2020	488886121581710.00	.2001237	45	18	.4113266	186
140	Kab. Sragen	2020	408757756523607.00	.1782630	45	30	.4479363	181
141	Kab. Sukoharjo	2020	567496998793930.00	.2301224	45	22	.4210687	176
142	Kab. Tegal	2020	360454095806727.00	.1659010	50	24	.4098031	189
143	Kab. Temanggung	2020	318496791539997.00	.1679484	45	30	.4162154	185
144	Kab. Wonogiri	2020	382106929519367.00	.1206385	50	30	.4724031	184
145	Kab. Wonosobo	2020	344134218611436.00	.1339674	45	24	.4252876	181
146	Kota Magelang	2020	416026261051739.00	.3072926	25	24	.4404221	177
147	Kota Pekalongan	2020	292191745138813.00	.2411652	35	23	.4546529	177

148	Kota Salatiga	2020	312269742867677.00	.2466115	25	19	.4774982	173
149	Kota Semarang	2020	2100391208127080.00	.4600699	50	18	.2689728	194
150	Kota Surakarta	2020	1213593159822230.00	.2690826	45	24	.4339307	186



Lampiran daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Indah Mutiara Safitri
2. Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 21 April 1999
3. Alamat rumah : RT/RW 06/02 Desa Wonopringgo
Kec. Wonopringgo
4. Alamat Tinggal : RT/RW 06/02 Desa Wonopringgo
Kec. Wonopringgo
5. Nomor Handphone : 085853539358
6. Email : mindah572@gmail.com
7. Nama Ayah : Amin Imron (Alm)
8. Pekerjaan Ayah : -
9. Nama Ibu : Darwati
10. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 01 WONOPRINGGO (2006 - 2011)
2. SMP : SMPN 01 WONOPRINGGO (2011-
2014)
3. SMA : SMK GONDANG (2014 - 2017)

Pekalongan, 17 Oktober 2023



Indah Mutiara Safitri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Muftara Safitri
NIM : 4317016
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : minoah572@gmail.com
No. Hp : 0850 5353 9350

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS
LKD KABUPATEN/KOTA di PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2016-2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 November 2023



nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD